

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**REORGANISASI DAN RASIONALISASI
APRI DALAM KABINET HATTA DAN PEMBERONTAKAN
PKI MADIUN 1948**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

IGN. TANTYA HISNU PRABOWO

NIM : 961314013

NIRM : 960051120604120010

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2003**

SKRIPSI

REORGANISASI DAN RASIONALISASI
APRI DALAM KABINET HATTA DAN PEMBERONTAKAN
PKI MADIUN 1948

Oleh :

Ign. Tanya Hisnu Prabowo

NIM : 961314013

NIRM : 960051120604120010

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M. A.

Tanggal, 28 Maret 2003

Pembimbing II



Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M. M.

Tanggal, 28 Maret 2003

SKRIPSI
REORGANISASI DAN RASIONALISASI
APRI DALAM KABINET HATTA DAN PEMBERONTAKAN
PKI MADIUN 1948

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Ign Tantya Hisnu Prabowo

NIM : 961314013

NIRM : 960051120604120010

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal, 28 Maret 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M. Pd.
Anggota	Drs. G. Moedjanto
Anggota	Drs. A. Kardiyat Wiharyanto
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.

Yogyakarta, 28 Maret 2003
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

.....
Dr. A. M. Slamet Soewandi, M.Pd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

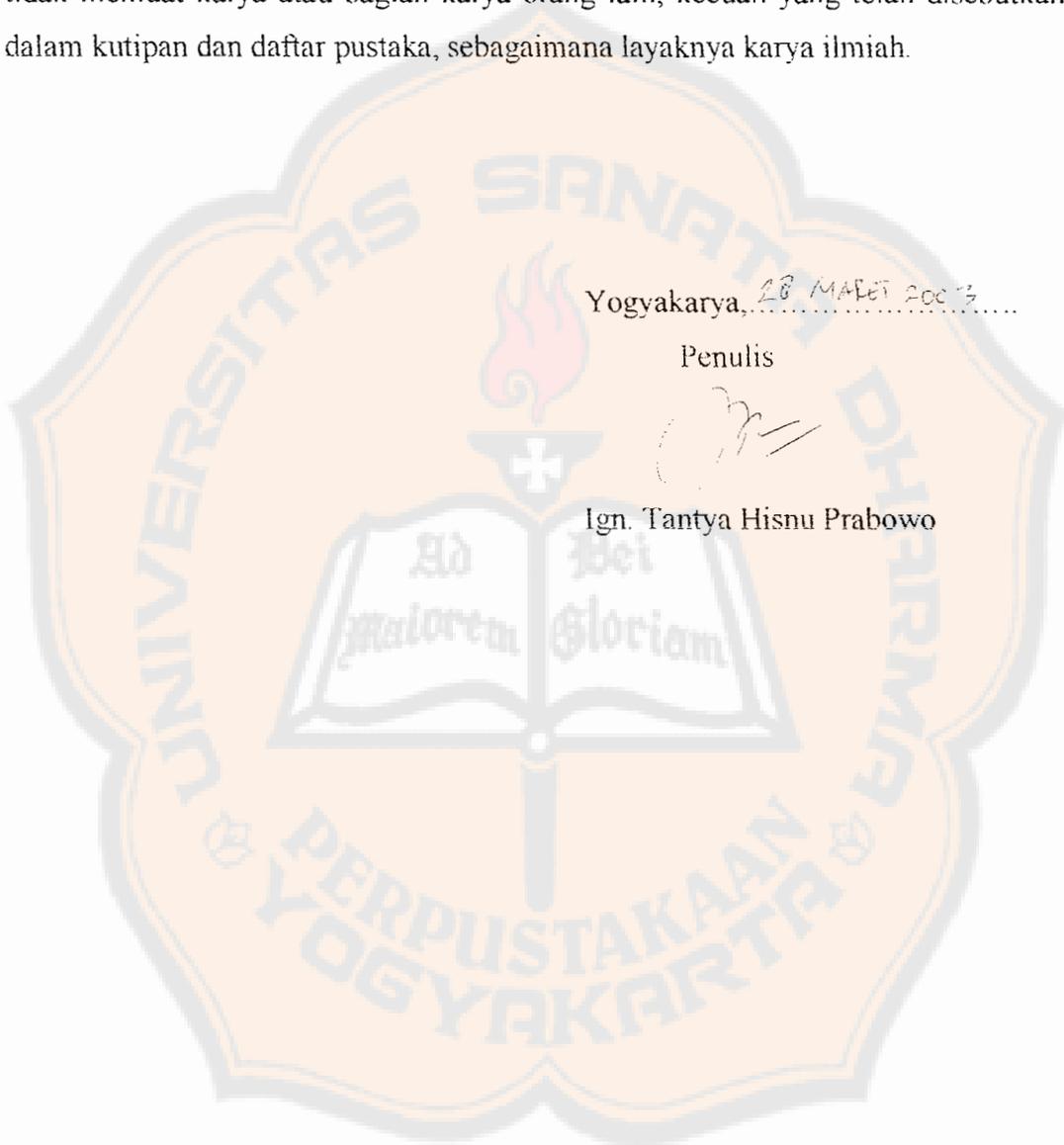
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 MARET 2023.....

Penulis



Ign. Tantya Hisnu Prabowo

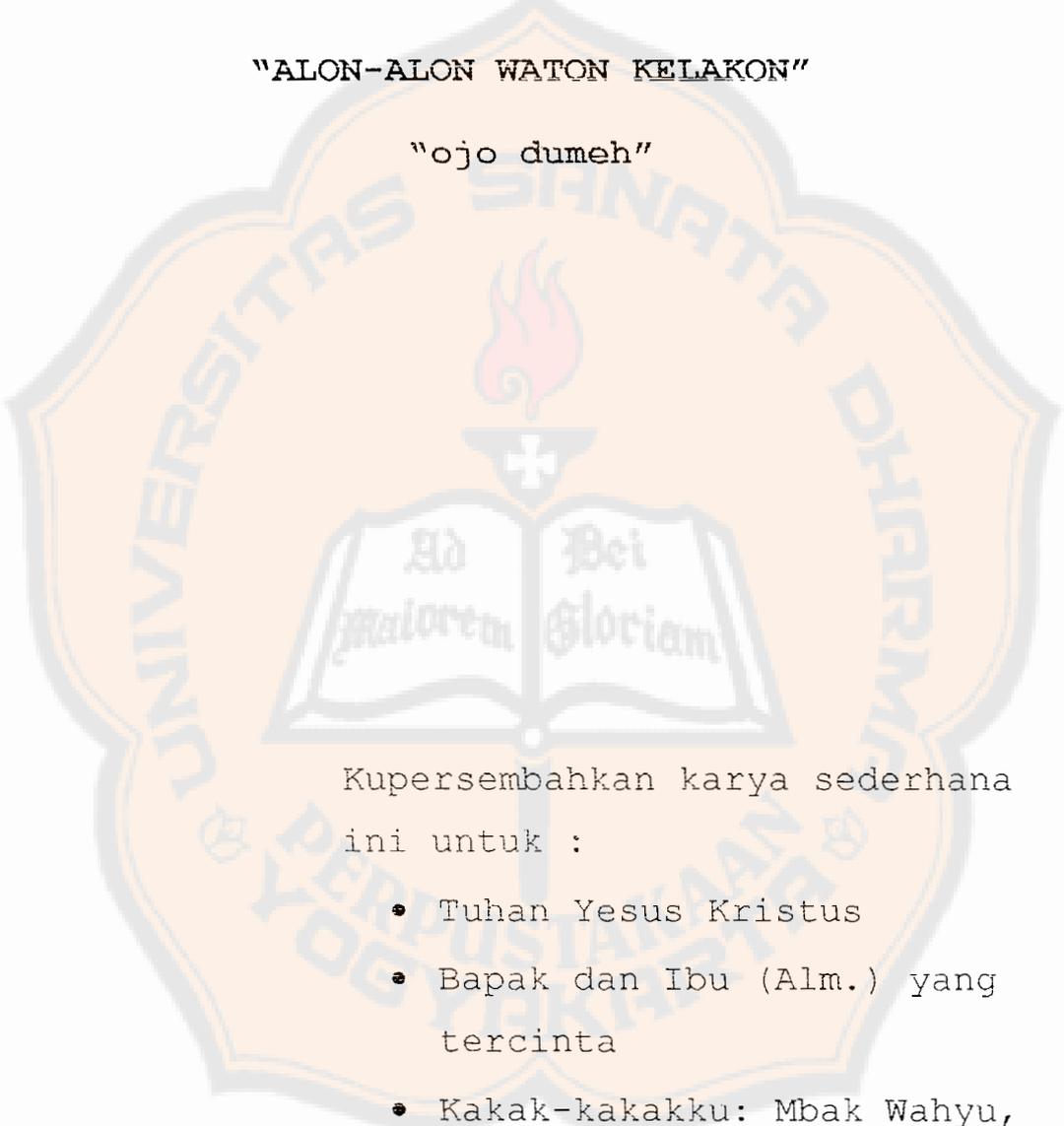


M O T T O

"JANGAN CEPAT PUAS DENGAN APA YANG KAMU RAIH"

"ALON-ALON WATON KELAKON"

"ojo dumeh"



Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
- Bapak dan Ibu (Alm.) yang tercinta
- Kakak-kakakku: Mbak Wahyu, Mbak Betti, Mbak Heni, Mas Bowo, Mbak Yuli dan adik-adikku : Ari dan Didit yang tersayang.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu situasi umum setelah kemerdekaan 1945, pelaksanaan RE-RA APRI dalam kabinet Hatta, dampak pelaksanaan RE-RA APRI.

Metode yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah RE-RA APRI merupakan salah satu program yang akan dilaksanakan Hatta atas pertimbangan tidak efektifnya militer pada masa itu (masih banyak tentara yang buta huruf) dan juga jumlah tentara yang terlalu banyak tanpa didukung persenjataan yang memadai sehingga seringkali kita mengalami kekalahan dalam tiap pertempuran dengan Belanda.

Namun di balik Program RE-RA APRI ternyata membawa kekecewaan terutama dari kalangan militer yang terkena RE-RA APRI seolah-olah mereka telah melupakan jasanya "habis manis sepah dibuang". Situasi yang demikian dimanfaatkan oleh FDR/PKI untuk menggagalkan kekuatan untuk menentang pemerintah, yang puncaknya FDR/PKI melakukan kudeta di Madiun.

Pemberontakan PKI Madiun dengan Program RE-RA APRI merupakan unsur terpenting atau dapat dikatakan sebagai pemicu utama dari peristiwa Madiun. Korelasi antara RE-RA APRI dengan peristiwa Madiun tidak dapat dilacak secara langsung, tetapi berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan dalam skripsi ini dapat dikatakan bahwa ada korelasi tidak langsung antara keduanya. Namun perlu ditegaskan bahwa tentara yang terkena RE-RA APRI bukan pemberontak PKI Madiun.

ABSTRACT

This thesis is to obtain some problems that is, general situation, after the independence day, the implementation of RE-RA in the Hatta Cabinet and the effect of RE-RA APRI implementation.

The method in use of this thesis research is an analyze descriptive method.

The obtained result of the research is that RE-RA APPRI is one of the programs implementing by Hatta under the consideration of the ineffectively in military at the moment. (some of the troops are illiterate) and also the numbers of the troops are too many without an adequate weapons so we suffered a loose in every battle occurred with the Dutch.

Nevertheless, behind of the RE-RA APPRI programs, obviously it gave a disappointment mainly in the military realm that hit by RE-RA APRI, as if they have been forgotten upon what they have done toward this country, "no more sweetness, throw away". Such kind of situation was used by FDR/PKI to supporting beam of unity against the government. Where is the top of the incident FDR/PKI is having a coup d'etat. In Madiun.

The PKI revolt in Madiun by it program RE-RA APRI is the most important substance or in other word it said as the main trigger of the Madiun incident. The correlation between RE-RA APRI with the Madiun incident is can not be trace directly, but according to the data collected in this thesis it could be said that there are an indirect correlation between them. But it need to be distinct that the military hit by RE-RA APRI were not Madiun PKI rebels.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“RE-RA APRI Dalam Kabinet Hatta Dan Pemberontakan PKI Madiun 1948”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Drs. Moedjanto, M.A selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Drs. A. Kardiyat Wihariyanto, M.M selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengoreksi skripsi hingga selesai.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Segenap Dosen dan Karyawan FKIP Jurusan Pendidikan Sejarah, yang telah mengajari penulis banyak hal dan memberikan pelayanannya selama penulis belajar di fakultas.
6. Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan literatur yang diperlukan penulis.
7. Karyawan Perpustakaan Daerah Yogyakarta, yang telah membantu penulis dalam melengkapi buku-buku literatur.
8. Bapak dan Ibu (Alm.), yang telah memberikan dorongan baik spiritual maupun material serta limpahan kasih sayang dan cinta yang tak berkesudahan.
9. Keluarga besar Th. Tukidjan, yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan angkatan '96 : Bimo, Binek, Yudha, Beni, Anik, Minda, Romana, Ida, Dani, Erlin, Sr. Vero, Asti, Yanti (terima kasih atas persahabatannya), juga teman-teman kost Sagan : Ekiek, Pai, Opung, Sumba, Ucok, Sihombing, Jumpa, Hendri, Ismet, Ito, Maman dll. Untuk Genk "S" Viktor, Deni, Endi, Manto, Londo, Acong, Roy, dll. Anak – anak "Joxer" Toklek, Kentung, Semar, Peyang, Klowos, Tekkok, Koco, Goco, Kuntheng, Togar (hidup sehat dong!). Anai, anak Be-Be dan Anak Planet: Yudho, Istika, Dwi, Eka, Yanti, Feri, Gondrek, Godheng, lin, Supri, dll (bekerja yang keras supaya sukses, oke!!!).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11. Semua rekan-rekan dari segala penjurur angkatan Prodi Sejarah yang mengenal penulis. Terima kasih atas segala perhatian, dan dorongannya sampai penulisan skripsi ini selesai. Juga buat Anna Psikologi '97, terima kasih sudah mau mengeditkan skripsi ini!
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala hal yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Akhir kata, dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan, maka segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini diterima dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. SITUASI UMUM SETELAH KEMERDEKAAN	13
A. Mencari Pengakuan Internasional	14
B. Menata Kekuatan Bersenjata	18

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III.	PELAKSANAAN RE-RA APRI DALAM KABINET HATTA	28
	A. Latar Belakang Munculnya RE-RA APRI Dalam	
	Perspektif Politik, Ekonomi dan Militer	29
	1. RE-RA APRI Dalam Perspektif Politik	32
	2. RE-RA APRI Dalam Perspektif Ekonomi	36
	3. RE-RA APRI Dalam Perspektif Militer	39
	B. Pelaksanaan RE-RA APRI	41
	1. Tujuan dan Sasaran RE-RA APRI	42
	2. Hambatan yang Muncul Dalam RE-RA APRI	46
	3. Alternatif Pemecahan	49
BAB IV.	DAMPAK PELAKSANAAN RE-RA APRI	52
BAB V.	KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penulisan sejarah Indonesia menunjukkan kemajuan seiring dengan perkembangan penulisan sejarah di negara Barat. Perkembangan ini sekaligus menghapus kesan seolah-olah Ilmu Sejarah memiliki corak penulisan yang spesifik, terpisah dari pengaruh ilmu-ilmu sosial. Salah satu ilmu sosial yang paling memberikan pengaruhnya dalam penulisan sejarah adalah ilmu politik. Penggunaan konsep, kerangka pemikiran maupun teori ilmu-ilmu politik dalam penulisan sejarah merupakan aliran baru yang kemudian dikenal sebagai penulisan sejarah dengan pendekatan perilaku (*behavioral aproach*) pendekatan perilaku membuat sejarah tidak saja mampu mengungkapkan “*apa, siapakah*” mengapa sebuah peristiwa sejarah dapat terjadi¹.

Skripsi ini mengambil judul, Reorganisasi Dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam Kabinet Hatta Dan Pemberontakan PKI Madiun Pemberontakan PKI Madiun merupakan salah satu peristiwa yang mengiringi munculnya gagasan RE-RA APRI pada tahun 1946. Pelaksanaan RE-RA APRI pada awalnya memang gagal dan baru terlaksana pada tahun 1948. Rasionalisme di sini merupakan salah satu pokok program pemerintah. Pemerintah bermaksud mengadakan perbaikan dalam susunan negara dan alat negara serta mencapai

¹. Alfian, *Pemikiran dan Pemahaman Politik di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, 1993, hlm. 211-212.

sedikit pertimbangan antara pendapatan dan belanja negara dan juga memperbaiki efektifitas susunan bentuk tata usaha dan administrasi negara yang dibacakan dihadapan sidang BP KNIP pada tanggal 14 Februari 1948.²

Jatuhnya Kabinet Amir menyebabkan Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Hatta untuk langsung memimpin kabinet. Sebagian besar anggota kabinet Hatta terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi dan PNI sementara Amir dan Partai Sosialisnya tidak ikut serta dalam kabinet tersebut. Penolakan Hatta dikarenakan orang-orang Partai Sosialis menghendaki Amir duduk kembali sebagai Menteri Pertahanan disamping menghendaki 3 kursi penting lainnya. Setelah tuntutananya tidak dipenuhi maka Partai Sosialis berposisi terhadap Kabinet Hatta.

Untuk memperkuat kedudukannya pada tanggal 26 Februari 1948 di Solo dibentuklah FDR (*Front Demokrasi Rakyat*) yang di dalamnya terdiri dari ; PBI (*Partai Buruh Indonesia*), PKI, Pesindo dan Sarbupri (*Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia*) untuk menandingi Kabinet Hatta, FDR menyusun program nasional terdiri dari 4 pasal yaitu :

1. Pembatalan persetujuan Renville
2. Penghentian perundingan-perundingan dengan Belanda sampai mereka menarik diri dari bumi Indonesia
3. Nasionalisasi semua kekayaan Belanda tanpa pemberian ganti rugi

² . AH. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, jilid 2A, Jakarta, Gunung Agung, 1993, hlm. 114

4. Parlemerter dimana wakil-wakil FDR diikutsertakan dengan menduduki kursi-kursi yang penting³

Dalam hal ini Hatta tidak menolak program di atas kecuali nomer 4 (empat), meskipun demikian FDR tidak putus asa untuk terus berkampanye untuk menjatuhkan kabinet Hatta.

Program RE-RA APRI "Hatta" dalam pengurangan jumlah tentara secara besar-besaran sangat mengelisahkan masyarakat dan kalangan militer, terutama kalangan militer yang dibina oleh Amir ketika menjadi PM (Devisi IV Solo). Dan kesatuan militer ciptaan Amir yang dikenal sebagai TNI masyarakat. Kesatuan ini dibina dengan keuangan dan persenjataan oleh PM Amir yang resminya untuk menghadapi Belanda, tetapi nyatanya untuk memperkuat kedudukannya sendiri dan golongannya.⁴

Sebenarnya tujuan Rasionalisasi dalam tentara RI yaitu dalam arti efisiensi/ untuk menciptakan hanya satu garis komando dalam angkatan perang. Pembentukan-pembentukan pasukan yang sederhana yang disesuaikan dengan fungsi perang gerilya serta pemakaian tanda pangkat yang rendah.⁵ Walaupun pemerintah telah menjelaskan bahwa tujuan RE-RA APRI semata-mata untuk efisiensi anggaran dan efektifitas tentara dalam pertempuran, tujuan itu dapat dipahami karena jumlah tentara ditambah badan perjuangan dan kelaskaran dirasakan terlalu banyak sehingga menjadi tidak efektif dalam bertempur, ini dikarenakan persediaan senjata yang sangat terbatas dan juga menyerap anggaran yang cukup besar.

³ . G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20*, jilid I, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 31.

⁴ . *Ibid.*, hlm. 31.

⁵ . *Ibid.*, hlm. 18.

Rasionalisasi ini menjadi salah satu detonator perpecahan TNI dan pemerintah yang sepenuhnya dieksploitasi oleh Belanda dan PKI untuk mencapai tujuan masing-masing. Belanda ingin mengakhiri keberadaan RI dan TNI, dan PKI ingin merebut pimpinan dan kekuasaan RI. Pergolakan dibidang politik dan militer semakin meninggi suhunya dengan meningkatnya ancaman Belanda terhadap RI ditambah dengan datangnya Muso dari Moskow yang membawa ajaran politik komunis. Memang harus diakui sungguh licik apalagi dibumbui dengan fitnah-fitnah yang memojokkan pemerintah, PKI memanfaatkan situasi yang ada dengan menerapkan siasat politik; isu yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat.⁶

Disamping masih menghadapi persoalan intern yang masih belum selesai, bangsa kita masih menghadapi berbagai ancaman terutama pemerintah kolonial yang sekiranya belum mau melepaskan RI, berbagai usaha dilakukan untuk kembali berkuasa di negara kita antara lain dengan mengadakan berbagai persetujuan, Linggarjati dan Renville dan juga adanya aksi militer yang dilakukan Belanda untuk menekan pemerintah dan melemahkan TNI. Aksi Belanda terhadap RI menimbulkan krisis ekonomi sebagai akibat blokade ekonomi. Untuk itu kita perlu waspada dan terus menghimpun kekuasaan maka dari itu diperlukan militer yang cakap.

Pihak tentara, politisi oposisi, badan perjuangan dan kelaskaran melihat bahwa RE-RA APRI itu tidak muncul pada saat yang tepat. Argumentasinya didasarkan atas fakta bahwa jumlah tentara tidak harus dikurangi mengingat

Belanda semakin agresif dalam menunjukkan kekuatan militernya untuk kembali menduduki RI. Pemerintah menanggapi argumentasi itu dengan menjelaskan bahwa kemenangan melawan Belanda bukan ditentukan oleh jumlah tentara tetapi lebih ditentukan ada tidaknya koordinasi. RE-RA APRI dimaksudkan untuk menciptakan tentara yang efektif dan terkoordinasi.⁷

Perbedaan persepsi atau pandangan tentang strategi mempertahankan kemerdekaan menimbulkan 2 kelompok :

- a. Kelompok yang memilih strategi diplomasi yang diwakili oleh Soekarno-Hatta dan Sutan Syahrir, Amir Syarifudin.
- b. Kelompok yang memilih bertempur yang diwakili oleh : Tan Malaka, Sudirman dengan dukungan Badan Perjuangan dan Tentara.

Perbedaan inilah yang menjadi penyebab gagalnya konsolidasi menghadapi Belanda dan dimanfaatkan Belanda, sebagai sarana menerapkan politik “*divide et impera*”.⁸

Salah satu dimanfaatkannya konflik kedua kubu itu adalah dipaksakannya berbagai perundingan oleh Belanda, justru pada saat posisi RI sangat menguntungkan. Sebagai akibatnya Belanda memperoleh banyak keuntungan untuk mengkonsolidasikan dirinya kemudian menekan posisi-posisi RI, sementara itu RI semakin melemah akibat politik mengulur waktu.⁹ Disamping rong-rongan yang ada di dalam negeri yang dilakukan oleh PKI.

Perbedaan inteprestasi atas kebijaksanaan RE-RA APRI kabinet Hatta menunjukkan bahwa angkatan perang telah ikut serta aktif dalam konstelasi

⁶ . *Ibid.*, hlm. 52.

⁷ . Pinardi, *September 1948 di Madiun*, Djakarta, Inkopak-Hazera, 1966, hlm. 54.

⁸ . Nasution, *Diplomasi Sambil Bertempur, jilid III*, Bandung, Angkasa, 1977, hlm. 74-75.

politik dengan atau tanpa mengintegrasikan ke dalam kekuatan politik yang ada, ini menunjukkan bahwa angkatan perang RI belum profesional karena tentara yang profesional akan netral dalam politik dan lebih akomodatif kepada pemerintah yang sah sepanjang tidak ada penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Perbedaan persepsi ini juga disebabkan karena ada kesan seolah-olah Amir Syarifudin sedang memecah belah angkatan perang dengan mendirikan TNI masyarakat.¹⁰

Terlepas dari perbedaan interpretasi, RE-RA APRI yang dipandang sebagai isu politik atau dipandang sebagai persoalan politik semata. Pada kenyataannya pelaksanaan RE-RA APRI menimbulkan dampak psikologis pada tentara, anggota badan perjuangan dan kelaskaran yang menjadi korban RE-RA APRI. Oleh karena itulah maka RE-RA APRI dimaksudkan untuk mengembalikan tentara menjadi satu.¹¹

Meskipun Muso dan PKI-nya telah mengeksploitasi kemelut RI sesudah Renville dengan amat licik, namun mereka telah keliru menilai keadaan. Memang benar dibidang militer nama Divisi Siliwangi yang sejak semula dianggapnya lawan. Dalam pada itu pemerintah telah semakin terpojok baik dalam politik luar negeri maupun dalam negeri yang menguntungkan bagi aksi PKI untuk merebut kekuasaan. Namun mereka keliru dengan penilaiannya terhadap sikap potensial rakyat banyak dan TNI yang teguh berpegang pada Pancasila.

Bagaimanapun gawatnya kemelut pada waktu itu, namun rakyat banyak merasa satu dengan pemerintah, dan berpegang teguh pada Pancasila. Sejarah

⁹. *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁰. Pinardi, *op. cit.*, hlm. 33.

¹¹. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan*, jilid VII, Bandung, Angkasa, 1977, hlm. 33.

menunjukkan, selama suatu pemerintahan mempunyai hati dimata rakyat banyak, maka selama itu pulalah pemerintahan akan terus berdiri dengan dukungan rakyat dan angkatan perang yang sukses sebagai elemen yang paling penting.

B. PERMASALAHAN

Setelah melihat gambaran di atas, ada beberapa masalah pokok yang dapat penulis rumuskan, dari permasalahan itu diharapkan mampu menjelaskan tulisan mengenai *“RE-RA APRI Dalam Kabinet Hatta Dan Pemberontakan PKI Madiun 1948”*. Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana situasi umum setelah kemerdekaan 1945?
 - a. Mencari pengakuan internasional
 - b. Menata kekuatan bersenjata
2. Bagaimana Pelaksanaan RE-RA APRI dalam kabinet Hatta?
 - a. Latar belakang munculnya RE-RA APRI dalam perspektif politik, militer dan ekonomi
 - b. Pelaksanaan RE-RA APRI
 - Tujuan dan sasaran RE-RA APRI
 - Hambatan yang muncul dalam RE-RA APRI
 - Alternatif pemecahan
3. Apa dampak pelaksanaan RE-RA APRI?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengenai situasi umum setelah kemerdekaan yang meliputi mencari pengakuan internasional dan menata kembali kekuatan bersenjata.
2. Menjelaskan proses Rasionalisasi Angkatan Perang RI dalam kabinet Hatta yang meliputi latar belakang munculnya RE-RA APRI dan pelaksanaan RE-RA APRI.
3. Menjelaskan dampak pelaksanaan RE-RA APRI yang meliputi timbulnya pemberontakan PKI Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu pada umumnya, menambah informasi tentang sejarah nasional Indonesia khususnya dalam RE-RA APRI dalam kabinet Hatta dan pemberontakan PKI Madiun 1948.
2. Bagi perkembangan pengetahuan sejarah diharapkan penulisan ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan sejarah tentang TNI.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan sejarah tidak semata-mata bersetujuan menceritakan kejadian suatu peristiwa tapi menerangkan kejadian itu dengan lengkap mencakup kondisi lingkungan, konteks sosio kulturalnya, pendeknya secara mendalam hendak

diadakan analisis tentang fakta-fakta kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.¹²

Dalam melakukan penelitian mengenai Rasionalisasi Angkatan Perang RI (1946-1948) penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemilihan subyek yang diteliti
2. Pengumpulan data/ sumber sejarah
3. Verifikasi atau kritik sumber
4. Interpretasi data sejarah
5. Historiografi

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis. Dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Sumber-sumber dikumpulkan sehingga dapat dijadikan sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diselidiki. Cara untuk mendapatkan sumber dalam penelitian adalah dengan studi pustaka, penulis mencari dan mengumpulkan buku-buku yang sesuai dan mendukung dengan topik diperpustakaan.

F. Tinjauan Pustaka

Guna membahas masalah yang dikemukakan maka dipakai beberapa sumber untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder, yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber yang dihasilkan oleh orang/ lembaga sejamin atau

¹². Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT. Gramedia, 1992, hlm. 62.

hasil rekaman sejaman dengan peristiwa. Sumber tersebut tidak berasal dari sumber lain (saksi pandangan mata baik sebagai pelaku maupun sebagai pengamat). Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang dihasilkan oleh orang/ lembaga yang tidak hadir dalam peristiwa yang dikisahkan (sumber dari tangan kedua).¹³

Penelitian ini membahas tentang latar belakang dan akibat dikeluarkannya Rasionalisasi Angkatan Perang RI (1946-1948) khususnya ditinjau dari berbagai aspek. Untuk membahas hal ini, penulis mempergunakan beberapa buku antara lain karangan AH. Nasution : *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2 A, Kenangan Masa Gerilya, Diplomasi Sambil Bertempur Jilid III dan Pemberontakan Madiun Jilid VIII*. Ditambah buku karangan Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, dan karya Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun* serta beberapa surat kabar harian antara lain, *Kedaulatan Rakyat* 9 Maret 1948 dan *Harian Api Rakyat Madiun* 17 Februari 1948. Ini merupakan buku acuan pokok untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada, disamping buku-buku yang lain.

Untuk membahas situasi umum setelah kemerdekaan penulis mempergunakan beberapa buku yang mendukung dalam pembahasan ini antara lain: karya Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*. G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke 20 jilid 1*, ditambah karangan Himawan Soetanto, *Rebut Kembali Madiun*, karya Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia jilid III*, karya Tjokropranolo, *Jendral Sudirman*, Jakarta :PT Surya

¹³ . Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (terjemahan)*, Nugroho Notokusanto, Jakarta, Universitas Indonesia, 1975, hlm.

Presindo, dan karya Nugroho Notosusanto (Editor), *Pejuang Dan Prajurit*, Jakarta : Sinar Harapan.

Mengenai proses pelaksanaan RE-RA APRI dalam kabinet Hatta penulis mempergunakan karangan AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia; Pemberontakan Madiun*, dikarenakan buku karangan Nasution lebih berfokus pada permasalahan ditinjau dari aspek militer disamping juga buku-buku yang lain. Dan juga ditambah beberapa sumber tertulis lainnya, diantaranya : Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*. Frans M. Parera, ed. *Bung Tomo: dari 10 Nopember 1945 ke Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia, 1982. Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Deliar Noer, *Mohammad Hatta; Biografi Politik Jakarta*. Dan ditambah beberapa surat kabar harian antara lain, *Harian Kedaulatan Rakyat* 5 Juli 1948 dan *Harian Api Rakyat Madiun* 17 Februari 1948. Untuk membahas dampak pelaksanaan RE-RA APRI penulis mempergunakan karangan Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*, karangan Himawan Soetanto. *Rebut kembali Madiun*, karangan Pusat Sejarah ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia 1945*, karangan Tim Penyusun Jawa Pos, *Lubang-lubang Pembantaian*. Dan Kursus Kader Katholik, *Dari Madiun ke lubang Buaya Dari Lubang Buaya ke....?*

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang RI 1946-1948 Dalam Kabinet Hatta dan Pemberontakan PKI Madiun terdiri dari lima (5) bab :

- Bab I : berupa pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : berupa penjelasan umum setelah kemerdekaan terdiri dari konsolidasi kekuatan politik, mencari pengakuan internasional dan menata kekuatan bersenjata.
- Bab III : berupa penjelasan Rasionalisasi Angkatan Perang RI 1946 – 1948 terdiri dari latar belakang munculnya RE-RA APRI dan pelaksanaan RE-RA APRI.
- Bab IV : berupa penjelasan dampak pelaksanaan RE-RA APRI terdiri dari timbulnya pemberontakan PKI Madiun.
- Bab V : berupa simpulan, berisi jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.

Demikian pendahuluan skripsi ini yang selanjutnya akan membahas situasi umum setelah kemerdekaan yang memuat mencari pengakuan internasional dan menata kekuatan bersenjata.

BAB II

SITUASI UMUM SETELAH KEMERDEKAAN

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan halaman cemerlang bagi sejarah bangsa Indonesia. Dalam perjuangan perebutan kemerdekaan bukanlah perjuangan yang gampang dan ringan. Revolusi ternyata menghendaki pengorbanan yang besar, namun bangsa Indonesia tidak mundur dari tekadnya yang telah dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tekad itu ialah :*"sekali merdeka tetap merdeka"*. Rakyat begitu rela, ikhlas, dan tulus untuk berkorban guna kelangsungan hidup negaranya, semuanya diberikan dengan ikhlas kepada tanah air demi terciptanya cita-cita Revolusi Bangsa Indonesia.

Pada waktu tahun pertama revolusi, kita semua merasakan betapa erat dan mendalamnya hubungan jiwa dan raga antara segenap rakyat Indonesia. Demikian pula hubungan dengan pemimpin-pemimpinnya hampir-hampir kesemuanya itu dilakukan tanpa pamrih. Hanya satu yang menjadi pamrih mereka bersama, yaitu membina dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mereka memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Tahun pertama kemerdekaan telah ditandai dengan dua peristiwa besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu meletusnya revolusi Surabaya tanggal 10 Nopember, dan lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada waktu itu masih bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang ternyata pada hari kemudian merupakan inti kekuatan dalam perjuangan melakukan perlawanan

fisik terhadap Belanda. TKR didirikan pada tanggal 5 Oktober 1945 yang pada perkembangannya dijadikan sebagai hari jadi ABRI.

A. Mencari Pengakuan Internasional

Pada tahun kedua revolusi Indonesia yang tetap dijiwai oleh semangat juang yang menyala-nyala tetapi juga suatu periode menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama diakibatkan oleh pertentangan yang tidak habis dengan pihak Belanda. Namun bangsa Indonesia tetap berjuang untuk mengusir Imperialisme Belanda yang ingin menguasai tanah air kita. Pada tahun 1946 Republik Indonesia dihadapkan dengan kesulitan dibidang politik, ekonomi dan militer.

Pada masa kabinet mulai menjadi sengketa-sengketa politik yang memecah perjuangan bangsa. Syahrir telah menganut suatu politik diplomasi dan kompromi dengan pihak Belanda yang berakibat lahirnya persetujuan Linggarjati, yang tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Pokok penting persetujuan Linggarjati adalah:

1. Pengakuan Belanda terhadap kekuasaan *de facto* Republik Indonesia di Pulau Jawa, Madura dan Sumatera.
2. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mendirikan sebuah Negara Serikat yang demokratis yang akan diberi nama Negara Indonesia Serikat.
3. Bahwa Negara Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda akan bekerja sama menuju pembentukan persekutuan politik atas dasar kedudukan yang sederajat.¹⁵

¹⁵ . Pinardi, *September 1948 di Madiun*, Jakarta, Inkopak-Hazera, 1966, hlm. 8.

Tahun 1946 dimulainya periode perjuangan yang beralih dari fisik ke diplomasi dan sebaliknya. Dan sejak itulah kita mengenal asam garam diplomasi dengan Belanda.

Disamping perjuangan secara fisik, bangsa Indonesia juga menempuh perjuangan dengan cara diplomatik keluar negeri. Misi-misi yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia keluar negeri dibawah pimpinan KH. Agus Salim mendapatkan hasil yang tidak kecil. Pengakuan-pengakuan luar negeri terhadap Republik Indonesia mulai mengalir. Tanggal 1 Juni Mesir mengakui Republik Indonesia, kemudian disusul oleh Libanon pada tanggal 29 Juni yang juga disusul oleh negara-negara Arab dan Asia lainnya, seperti 2 Juli Suriah, 16 Juli Irak, 23 September Afganistan, 23 November Birma, 24 November Saudi Arabia. Disamping itu kemenangan lain yang dicapai Republik Indonesia dibidang diplomasi ialah bahwa sengketa-sengketa bersenjata antara Republik Indonesia dan Belanda masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB dan PBB memerintahkan agar agresi militer Belanda dihentikan atau yang dikenal dengan perintah "*cease fire*" yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1947.¹⁶

Pengakuan-pengakuan negara luar, dan sampainya konflik Indonesia-Belanda ini dipersidangan Dewan Keamanan PBB merupakan titik cerah dalam kabut kesukaran yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan Belanda di bidang politik, ekonomi, militer. Semenjak persoalan Indonesia menjadi pokok perundingan-perundingan di meja hijau dan konferensi-konferensi internasional, maka soal Indonesia tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia dan Belanda

¹⁶. *Ibid.*, hlm. 11

saja. Persoalan Indonesia telah menjadi persoalan Dunia, dan bukan lagi soal dalam negeri tetapi menjadi persoalan seluruh umat manusia yang mencintai kemerdekaan dan keadilan seluruh dunia. Belanda ternyata tidak berhasil mengisolir pertikaiannya dengan Indonesia menjadi pertikaian dalam negeri saja, tetapi pertikaian itu meledak menjadi masalah dunia dan sejak itulah republik Indonesia mulai dikenal oleh banyak bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sejak itulah Indonesia muncul sebagai bangsa yang penuh dengan heroisme dan patriotisme yang menyala-nyala.

Satu hal yang nyata, Indonesia telah diakui oleh dunia internasional sebagai pihak yang didudukan sama tinggi dalam persengketaan dengan Belanda. Kemudian dewan keamanan PBB mengeluarkan perintah untuk mengadakan gencatan senjata. Dengan demikian secara politis blokade Belanda hancur, kemudian dewan keamanan PBB memutuskan untuk mengangkat "*COMMITTEE OF GOOD OFFICES*" yang lebih kita kenal dengan sebuah Komite Tiga Negara atau KTN yang anggota-anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia yang tugasnya ialah menjadi badan perantara untuk menyelesaikan persengketaan antara Republik Indonesia dan Belanda dengan jalan damai. Pada bulan Oktober 1947 KTN mengirimkan utusan-utusannya yang pertama dan mereka bekerja sebagai perantara atau penengah dalam konflik Indonesia-Belanda, yang ternyata dikemudian hari telah menyeret Indonesia ke dalam suatu penyelesaian yang lebih merugikan bagi Indonesia yaitu suatu penyelesaian yang melahirkan persetujuan Renville, yang merupakan bencana besar bagi kelangsungan hidup Republik Indonesia.

Persetujuan Renville membawa bencana bagi wilayah Republik Indonesia yang tinggal “selebar daun kelor”, (akibat garis Mook), ditekan secara politik, diblokade hubungan-hubungan ekonominya dan dikepung secara militer. Belanda semakin yakin bahwa RI dapat dipatahkan dengan kekerasan di dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sementara itu di Yogyakarta, ibu kota RI terjadi pergolakan. Setelah penandatanganan Persetujuan Renville, terjadi krisis dalam kabinet Amir Syarifuddin. Masyumi dan PNI menarik menteri-menterinya dari kabinet Amir Syarifuddin dengan menyatakan “menolak persetujuan dan menganggap bahwa kabinet Amir tidak akan mampu lagi meneruskan tugasnya”. Sementara itu, sayap kiri mengadakan demonstrasi besar-besaran membela kabinet Amir Syarifuddin.¹⁶ Untuk mengatasi kegawatan politik itu Presiden Soekarno mengumumkan tanggal 23 Januari 1948 bahwa kabinet Amir Syarifuddin bubar dan seterusnya Wakil Presiden Mohammad Hatta menyusun kabinet baru.

Pemerintah Hatta telah jelas kebijaksanaan politiknya dan dibidang militer bertekad meneruskan apa yang telah diciptakan oleh kabinet Amir Syarifuddin, sedangkan pihak oposisi PKI dan partai Sosialisnya. Amir Syarifuddin yang dahulu menggolkan persetujuan Renville, kini menentang pemerintah. Dalam perkembangannya golongan kiri membentuk kekuatan oposisi, membentuk suatu Front Demokrasi Rakyat. Mereka berusaha untuk menggalang kekuatannya dengan berusaha untuk menarik golongan-golongan lain ke dalam kubunya. Apabila tidak hendak menggabungkan dengan FDR, dimusuhinya. Pasukan Hijrah Siliwangi telah beberapa kali didekati oleh FDR, tetapi tidak berhasil.

¹⁶. Himawan Soetanto, *Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 56.

Nasib tentara Hijrah Siliwangi di Jawa Tengah menemukan lingkungan yang memusuhinya yaitu dari pihak PKI yang menganggap Siliwangi sebagai alat pemukul dari kabinet Hatta . Dalam keadaan hijrah memaksakan kabinet Hatta untuk secepatnya reorganisasi atau rekonstruksi dan pengelompokan baru khususnya menghayati ide-ide baru tentang pola perang rakyat yang dialami di dalam menghadapi agresi pertama Belanda.

B. Menata kekuatan Bersenjata

Ketika Republik Indonesia diproklamlirkan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memasuki suatu dunia yang penuh kebingungan mencoba menyesuaikan dirinya dengan ambuknya rezim militer Jepang secara tiba-tiba. Pada saat itu kita merasa sebagai sebuah negara yang baru lahir disana sini perlu ada penataan atas semua kekuatan bersenjata sebagai kekuatan utama revolusi disamping lembaga pemerintahan. Ini sangat diperlukan karena pada masa itu negara kita belum aman benar masih ada ancaman Belanda untuk kembali berkuasa di tanah air kita.

Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diakui oleh sebagian masyarakat dunia terutama negara-negara Eropa (Sekutu Belanda dalam Perang Dunia II). Mereka masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia yang ditandai dengan kedatangan pasukan sekutu dengan misi untuk melucuti tentara Jepang dan membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan Belanda, walaupun para pemimpin Indonesia memprotes kembalinya para pejabat pemerintah dan tentara Belanda mereka tidak mempunyai kekuatan militer untuk mencegahnya.

Bangsa Indonesia harus menghadapi tantangan dan perjuangan fisik yang lebih berat yaitu tantangan menghadapi sisa-sisa tentara Jepang dan kembalinya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia yang membonceng tentara sekutu, yang harus dihadapi oleh tentara dan rakyat Indonesia. Agar kekuatan rakyat ini dapat terkoordinasikan dengan baik maka pada tanggal 22 Agustus 1945 pemerintah RI membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas untuk menjaga keamanan.

Kembalinya Belanda ke Indonesia dasar utamanya adalah masih bersifat ekonomis yaitu masih adanya anggapan bahwa Belanda tanpa Indonesia tak mungkin bertahan hidup tetapi supaya tindakan menduduki kembali Indonesia dibenarkan menurut hukum internasional maka Belanda menyatakan bahwa bukan lagi koloni melainkan wilayahnya yang sejajar dengan wilayah Belanda di Eropa.¹⁸ Datangnya tentara sekutu ke Indonesia mendapat reaksi yang bermacam-macam. Salah satu pihak ada yang senang dan mendukung di lain pihak ada yang was-was atau curiga atas kedatangan sekutu.

Dalam menghadapi situasi yang demikian timbullah organisasi-organisasi atau badan-badan perjuangan yang bermacam-macam corak dan namanya. Maka pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah BKR yang pada awalnya hanya menampung bekas-bekas anggota PETA. BKR bukanlah tentara tetapi korps pejuang bersenjata yang bertugas memelihara keamanan bersama-sama rakyat. Sungguhpun begitu dalam kenyataannya BKR tidak hanya membantu melainkan memelopori, mendorong dan memutar roda revolusi. BKR inilah yang kemudian

¹⁸. G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm.99.

berkembang dan menjadi landasan serta inti Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pertumbuhan Angkatan Perang RI memang lain daripada yang lain, ia tumbuh secara spontan dari rakyat yang sedang berjuang untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang merdeka. Rakyat memutar revolusi dengan membangun tentaranya dengan mempersenjatai diri dan hasil rampasan senjata dari Jepang. Tentara RI bukanlah warisan penguasa kolonial, tetapi lahir sebagai tentara rakyat dari dan untuk rakyat dan didukung oleh rakyat baik moril maupun materiel.

Kedatangan Sekutu dengan NICA menjadikan situasi semakin panas. BKR (Badan Keamanan Rakyat) merasa kewalahan dalam menghadapi sekutu, disebabkan mereka belum terorganisir dengan baik (profesional) belum ada organisasi pusatnya. Dalam menghadapi situasi yang demikian maka Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 mengeluarkan Dekrit pembentukan tentara nasional atau TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang mempunyai misi melindungi rakyat dan mempertahankan kemerdekaan.¹⁹

Pembentukan TKR mendapat sambutan hangat dari rakyat, tempat-tempat pendaftaran hampir tak mampu menampung beribu-ribu pemuda yang datang untuk mendaftarkan diri. Bukan hanya TKR yang mulai menyusun organisasi dan kekuatannya, akan tetapi rakyat umum juga membentuk laskar-laskar sebagai bentuk rasa ingin membela tanah air dari ancaman Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.

¹⁹. Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia*, Jilid II, hlm. 44.

Kebanyakan laskar-laskar ini dipimpin oleh golongan pemuda, sedang senjatanya diperoleh dari tentara Jepang dan bambu runcing. Tujuan utama dari laskar-laskar itu ialah mempertahankan Revolusi Nasional dan menghabiskan sisa-sisa penjajah. Laskar-laskar tersebut kebanyakan ideologis yang dipimpin oleh badan-badan perjuangan yang tumbuh dari rakyat sendiri (sebelum timbulnya partai).²⁰

Dalam setiap revolusi sangatlah penting peranan suatu Angkatan Bersenjata. Bangsa jajahan yang berevolusi umumnya tidak mempunyai suatu angkatan bersenjata, revolusi di Indonesia dimulai atau dipelopori oleh pemuda dan rakyat khususnya mereka yang telah mempunyai pengalaman memegang dan mempergunakan senjata yaitu bekas tentara Jepang, Peta, Seinendan dan Heiho dan bekas tentara Belanda KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger).

Sampai saat ini badan-badan perjuangan (laskar-laskar) belum bersedia melebur diri ke dalam TKR yang sejak 1 Januari 1946 berarti Tentara Keselamatan Rakyat. Mereka nampaknya belum bisa melepaskan diri ikatan politiknya. Mereka menganggap hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Bahkan mereka ada yang berpendapat bahwa laskar lebih berhak hidup karena langsung bersumber kepada rakyat, sementara TKR dinilainya hanya menjadi alat pemerintah (negara) yang dikendalikan oleh sejumlah partai tertentu. Nama TKR tidak cukup menarik, begitu juga perubahan

²⁰. *Ibid.*, hlm. 119.

nama dari TKR ke TRI (Tentara Republik Indonesia) pada tanggal 25 Januari 1946, karena itu pemerintah mengakui hak hidup dari laskar-laskar.²⁰

Guna memantapkan posisi TNI pada masa itu, pada tanggal 23 Februari 1946 dikeluarkan Penetapan Presiden untuk membentuk Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Panitia Besar Reorganisasi ini beranggotakan 11 orang, dipimpin oleh Letnan Jendral Oerip Soemoharjo. Hasil kerja Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi diumumkan pada tanggal 17 Mei 1946, yang meliputi :

1. Organisasi Markas Besar TRI dengan pejabat-pejabatnya sebagai berikut : Panglima Besar Jendral Sudirman, Kepala Markas Besar Umum Letnan Jendral Oerip Soemohardjo, Panglima Besar membawahi divisi-divisi TRI. Jumlah divisi TRI yang semula sepuluh divisi diperkecil menjadi tujuh divisi dan tiga brigade di Jawa Barat serta tiga divisi di Sumatra.
2. Di Kementerian Pertahanan dibentuk Direktorat Jendral Bagian Militer, dibawah pimpinan seorang direktur jendral, Mayor Jendral Sudibjo.
3. Badan Perjuangan dan Laskar-laskar yang tidak mau menggabungkan diri pada TRI diberi wadah satu biro tersendiri dalam kementerian pertahanan yang diberi nama Biro Perjuangan.²¹

Adanya dua macam bala bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler di satu pihak dan badan perjuangan di lain pihak, sangat tidak menguntungkan perjuangan. Banyak laskar yang berhaluan sesuai dengan politik partai dimana ia

²⁰ . G. Moedjanto. *op.cit.*, hlm. 122.

²¹ . Nugroho Notokusanto (Editor), *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985, hlm 44.

bernaung. Hal ini disadari oleh pemerintah yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersatukan kedua bala bersenjata ini.

Pada tanggal 24 Januari 1946 diputuskan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas menerapkan pola dasar tentang pendidikan. Namun pola Badan Pendidikan ini disesuaikan dengan konsepsi Amir Syarifuddin yang tertuang di dalam suatu pengumuman Departemen Keamanan Rakyat, tanggal 14 November 1946. Ini adalah hasil interaksi antara Panglima Besar Soedirman beserta stafnya pada satu pihak, yang ingin mempertahankan otonomi Angkatan Perang, dengan Menteri Amir Syarifuddin pada lain pihak yang menganut prinsip supremasi sipil terhadap Angkatan Perang. Menurut konsepsi Amir, TKR harus mempunyai dasar keyakinan politik yang teguh, yang sesuai dengan konsepsi partai sipil yang berkuasa, seperti halnya Tentara Merah di Uni Soviet.²³ Pada bulan Februari 1946 badan itu berhasil merumuskan sistem pendidikan bagi TRI berdasarkan konsepsi Amir Syarifuddin. Orang-orang politik anggota badan pendidikan itu kemudian diberi pangkat militer. Setelah diadakan reorganisasi, badan pendidikan yang semula berada dalam lingkungan Markas Tertinggi TRI dipindahkan ke Kementerian pertahanan. Pada tanggal 30 Mei 1946 nama badan itu diubah menjadi Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) dipimpin oleh Sukano Djojopratignjo (komunis).

Keputusan rapat besar TKR mengenai pendidikan tentara yang semula dianggap masuk akal itu, sejak menjadi Pepolit menimbulkan persoalan karena menyimpang dari tujuan semula. Pepolit ternyata dimanfaatkan oleh Mentri

²³ . *Ibid.*, hlm. 45.

maka seperti juga Pepolit, Biro Perjuangan mempunyai sifat alat politik dalam tangan Menteri Amir Syarifuddin. Dalam pandangan pemerintah menganggap perlu memberikan satu wadah berupa biro perjuangan dalam kementerian pertahanan. Tujuannya ialah agar tercipta koordinasi yang harmonis dan penegasan pembagian tugas. Tetapi karena laskar-laskar ini merupakan “anak” dari partai politik, maka dalam tindakan mereka lebih mengutamakan kepentingan partainya daripada tugas pokoknya : membela negara. Hal ini sudah barang tentu menimbulkan dualisme dan karenanya sangat merugikan perjuangan. Karena Biro perjuangan dimonopoli oleh kawan separtai menteri pertahanan, maka program kerja dan konsepsi perjuangannya diselaraskan dengan program partainya. Biro Perjuangan berakhir setelah dibentuknya TNI pada bulan Juli 1947.

Tentara RI lahir dari dan dalam revolusi, organisasi itu mulai tumbuh di daerah-daerah tanpa pemerintah pusat mampu mengendalikan mereka sejak permulaan. Keadaan daerah-daerah dalam masa revolusi memang mempersulit pembentukan dan keefektifan komando yang terpusat. Dengan perkataan lain pada masa revolusi desentralisasi komando terpaksa diadakan, keadaan menjadi lebih sulit karena adanya laskar-laskar. Bahkan lebih buruk lagi karena antara kesatuan-kesatuan TRI, maupun antara TRI dan laskar-laskar sering terlibat dalam pertentangan sendiri. Ini semua melemahkan perjuangan menegakkan kemerdekaan. Karena itu presiden atau Panglima Tertinggi pada tanggal 5 Mei 1947 mengeluarkan dekrit yang mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah panitia yang diketuai sendiri oleh panglima tertinggi.

Kemudian panitia itu bekerja dalam beberapa minggu dan hasilnya dituangkan ke dalam Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 telah disyahkan dengan resmi berdirinya TNI, dan bahwa segenap anggota Angkatan Perang yang ada dan segenap anggota laskar-laskar yang bersenjata dimasukkan serentak ke dalam TNI. Tanggapan laskar-laskar terhadap TNI lebih positif daripada terhadap TKR, kiranya TNI dapat memuaskan aliran-aliran dalam laskar-laskar, yang tetap berpendirian bukan sebagai alat negara melainkan sebagai alat rakyat, alat revolusi, alat bangsa.²⁵

Meskipun demikian realisasi dekrit tersebut masih memerlukan waktu beberapa tahun, karena satu setengah bulan kemudian pecahlah Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Pelaksanaan selengkapnya baru selesai setelah Agresi Militer Belanda II berakhir. Kalau kita amati sebelum berubahnya TRI dengan TNI, laskar dan Biro Perjuangan sulit untuk diajak bersatu dalam sebuah wadah atau organisasi tentara yang modern. Ada beberapa alasan yang dapat kita jadikan perbandingan, yaitu :

1. Latar belakang kemunculan yang berbeda, Biro Perjuangan dan laskar sudah ada sebelum kemerdekaan sementara tentara yang akan dibentuk secara profesional baru dimunculkan setelah kemerdekaan, ini menjadikan seolah-olah pemerintah mengabaikan atau menyepelekan jasa badan perjuangan dan laskar.
2. Ada perbedaan mendasar dari struktur organisasi dan ideologi.

²⁵ . *Ibid.*, hlm. 123.

Dari sini kita bisa melihat perbedaan yang nyata antara TNI dan laskar atau badan perjuangan, meskipun dalam tujuan atau cita-cita hampir sama yaitu melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Namun dalam pelaksanaan banyak perbedaan yang mendasar karena masing-masing kesatuan mempunyai dasar dan ideologi sendiri-sendiri. Untuk mempersatukannya pelu suatu organisasi yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu, maka dibentuklah TNI sebagai suatu badan tentara yang bisa menampung aspirasi maupun perbedaan yang ada.

Disamping kita bersiap-siap menghadapi kemungkinan serangan Belanda ke Yogyakarta, pasukan TNI dihadapkan pada kenyataan lain yaitu harus menghancurkan kekuatan PKI yang menjalankan aksi kudetanya di Madiun September 1948. Walaupun penumpasan pemberontakan Madiun menjadikan TNI dalam keadaan lemah, namun TNI masih sanggup dan mampu menghadapi serbuan Belanda. Keadaan negara Indonesia pada waktu itu secara politis memang masih kacau, muncul saling curiga-mencurigai baik antara para pemimpin pemerintahan, partai politik maupun militer. Begitu juga keadaan ekonomi yang masih morat-marit, kekurangan bahan makanan, obat-obatan dan lain-lain.³⁶

Meskipun hanya dibahas secara singkat, kiranya dapat sebagai pengantar untuk pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan pada Bab III akan diuraikan tentang pelaksanaan RE-RA APRI dalam kabinet Hatta.

³⁶. Tjokropranolo, *Jendral Soedirman*. Jakarta, PT Surya Persindo, 1992, hlm.106.

BAB III

PELAKSANAAN RE – RA APRI DALAM KABINET HATTA

Setelah mengetahui situasi umum setelah kemerdekaan yang merupakan bingkai dari skripsi ini, bab ini akan memberikan dan meletakkan isi dari bingkai itu. Pada konteks ini adalah bagaimana RE-RA APRI dalam kabinet Hatta dan pemberontakan PKI Madiun menjadi isi dari bingkai yang dimaksud. Dengan perkataan lain apakah RE-RA APRI itu sesuai atau kemunculannya justru menimbulkan gesekan-gesekan dalam tubuh bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajahan Belanda.

Sejarah Indonesia mencatat adanya beberapa kali terjadi reorganisasi dan rasionalisasi dalam tubuh angkatan perang. RE-RA APRI pertama kali dilakukan pemerintah pada tanggal 25 Januari 1946 dengan maksud untuk mengorganisasikan tentara dan badan-badan perjuangan, tetapi niat itu gagal karena hanya berhasil secara administratif (perjuangan dari 10 divisi menjadi 7 divisi), sedangkan badan-badan perjuangan gagal diikutsertakan. Rasionalisasi RE-RA APRI ke dua dilaksanakan berdasarkan UU No. 3/1948 dengan maksud melakukan efisiensi anggaran tetapi justru menimbulkan gejolak karena dipolitisi golongan “kiri” sehingga menimbulkan apa yang disebut peristiwa Madiun.²⁷

Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap RE-RA APRI ada beberapa hal umum yang dijadikan alasan untuk sampai pada keputusan untuk diadakan RE-RA APRI itu :

²⁷. Nasution, *op.cit.*, hlm.130.

1. Bahwa jumlah tentara dianggap terlalu banyak sehingga menjadi tidak efektif dalam tugas dan tidak bermutu, karena pada masa itu masih ada anggota TNI yang buta huruf.
2. Karena adanya kesulitan ekonomi sehingga organisasi tentara harus melakukan efisiensi dalam penggunaan dana.
3. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang normal sekalipun rasionalisasi tetap harus dilakukan untuk memperoleh jumlah tentara yang normal untuk dijadikan tentara profesional.

Kembali pada topik utama skripsi ini yang membahas RE-RA APRI dalam kabinet Hatta dan pemberontakan PKI Madiun. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa RE-RA APRI itu harus dilakukan justru pada saat negara sedang menghadapi musuh yang secara jelas menggelar kekuatan militer. Sedemikian parahkah kondisi ekonomi pada waktu itu sehingga pilihan terakhir adalah melakukan efisiensi dengan pengurangan jumlah tentara.

A. Latar Belakang Munculnya RE – RA APRI Dalam Perspektif Politik, Ekonomi dan Militer

Setelah jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin, RI mengalami krisis kepemimpinan untuk mengatasi krisis ini maka presiden soekarno menunjuk wakil presiden Moh. Hatta untuk membentuk sebuah kabinet presidensil yang tak tergantung kepada mayoritas dalam parlemen. Walaupun demikian, Hatta bertekad untuk memperoleh dukungan parlemen dan karenanya dia memilih tokoh-tokoh politik dari PNI, Masyumi, golongan Syahrir dalam partai sosialis,

dan partai-partai Kristen untuk mengisi jabatan dalam kabinetnya bersama-sama dengan sejumlah teknokrat yang tidak berpartai. Sementara itu Amir, bersama-sama dengan orang-orang komunis, partai buruh, dan Pesindo menjadi oposisi. Pada tanggal 29 Januari 1948, enam hari setelah kabinet Amir jatuh, Hatta memperkenalkan kabinetnya. Kabinet Hatta mempunyai empat program pokok yaitu :

1. Menyelenggarakan Persetujuan Renville
2. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat
3. Rasionalisasi
4. Pembangunan²⁸

Dalam menjelaskan garis-garis besar kebijaksanaan yang akan ditempuhnya, Hatta secara eksplisit mengakui persetujuan Renville dan semua kewajiban yang ditimbulkannya, dan dia memerintahkan semua pasukan yang masih berada di daerah-daerah kantong di belakang “garis van mook” untuk mengundurkan diri ke wilayah yang masih dikuasai RI. Dan juga menyatakan niat pemerintah RI untuk berpartisipasi dalam pemerintah federal sementara yang akan dibentuk di Jakarta dan bekerja sama dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat. Disisi lain, Hatta juga ingin memperbaiki ekonomi serta merasionalisasikan Angkatan Bersenjata dan seluruh aparat negara.

Dalam kaitannya dengan tentara, tujuan dasar kebijaksanaan RE-RA itu adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efisiensinya, dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah.²⁹

²⁸ . Pinardi, *op.cit.*, hlm. 20 – 22.

²⁹ . Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, Jakarta, LP3ES, 1986, hlm. 64.

Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting, karena kesatuan-kesatuan tempur ketika itu sudah mulai menguasai daerah-daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan mereka masing-masing (kurang koordinasi). Ini berdampak pada serangan-serangan kita atau taktik yang telah direncanakan oleh TNI tidak efektif, sehingga seringkali TNI mengalami kekalahan-kekalahan terhadap tentara Belanda. Tentu kita menyadari betapa lemahnya tentara kita waktu itu jika dibandingkan dengan tentara Belanda yang lebih modern baik itu persenjataannya ataupun organisasi atau struktur komandonya. Oleh karena itu pemerintah waktu itu terdorong untuk mengadakan RE-RA APRI guna lebih menjadikan tentara kita atau TNI menjadi tentara yang profesional.

Begitu terbentuk, kabinet Hatta langsung dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang menggunung, terutama pekerjaan yang rumit yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa RI–Belanda secara damai dalam rangka persetujuan Renville. Tugas kedua yaitu dibidang usaha untuk memperbaiki kehancuran ekonomi Republik yang diakibatkan oleh Agresi Militer Belanda I. Kesulitan-kesulitan ekonomi diperparah oleh persetujuan Renville itu sendiri, republik yang wilayahnya semakin menciut itu terpaksa harus menampung kira-kira sejuta lebih kaum pengungsi dari daerah kedudukan Belanda. Belum lagi dihitung jumlah tentara dan anggota-anggota keluarganya yang ditarik dari daerah-daerah kantong yang jumlahnya meliputi \pm 35.000 orang.³⁰

³⁰. *Ibid.*, hlm. 22.

Perdana menteri Moh. Hatta pada tanggal 16 Februari 1948 menyampaikan programnya itu ke depan sidang BP KNIP yang isinya :

Untuk mengecilkan defisit dalam anggaran belanja negara harus dilakukan rasionalisasi buruh dilapangan kerja yang tidak produktif harus disalurkan ke lapangan kerja yang produktif agar kerja yang produktif tersebut pendapatan negara bertambah.....

Terutama dikalangan Angkatan Perang harus dilakukan proyek rasionalisasi dengan garis yang jelas. Karena di dalam angkatan perang terjadi penggunaan tenaga manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak dimulai mengadakan rasionalisasi, maka negara akan mengalami inflasi yang begitu parah sehingga bisa melemahkannya.

.....untuk setiap orang yang terkena rasionalisasi harus mendapatkan lapangan kerja baru untuk dapat hidup yang layak.³¹

Dalam taraf pertama akan didemobilisasikan sebanyak 160.000 orang dari kalangan anggota angkatan perang. Diharapkan dalam angkatan perang RI akan terdapat jumlah 57.000 orang yang akan diorganisir dan dilengkapi dengan senjata dan dilatih dengan baik. Tentara yang bermutu internasional yang akan dibentuk hendaknya jangan ada anggota TNI yang buta huruf.

1. RE – RA APRI dalam Perspektif Politik

Munculnya RE-RA APRI kedua pada tahun 1948 merupakan realisasi dari “mosi Baharudin dkk” dalam sidang BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada tanggal 20 Desember 1947. Dalam keterangan pers setelah mosi itu diterima dan menjadi undang-undang Baharudin mengatakan bahwa tujuan dari mosi itu semata-mata ingin membaharui dan mengefektifkan bentuk dan susunan tentara kita dengan berpedoman kepada cita-cita satu tentara, satu

³¹ . *Ibid.*, hlm. 23.

komando untuk memperkuat pertahanan dengan mengingat alat-alat senjata dan faktor-faktor lain dan berdasar People Defence.³²

Akan tetapi jika kata-kata itu dikaitkan dengan konsfeksi dan polarisasi politik pada waktu itu maka kata-kata itu bermakna tidak kuatnya sistem pertahanan kita. Ketidakkuatan badan perjuangan dan laskar untuk bergabung dengan tentara dalam suatu sistem pertahanan dalam kerangka “*total people defence*” ada kesan seolah-olah badan perjuangan dan laskar menentukan sendiri bentuk dan strategi bertempur yang dalam banyak kejadian justru mengacaukan strategi yang ingin dijalankan oleh tentara secara terkoordinasi.³³

Pemerintah akan menyiapkan dasar-dasar untuk menjadikan tentara kita jadi tentara milisi. Tentara milisi lebih baik daripada tentara gajian, karena tentara milisi menanam rasa kewajiban untuk mempertahankan tanah air. Segala tindakan menuju rasionalisasi tidak boleh menimbulkan pengganggu yang pada dasarnya merugikan masyarakat. Bagi tiap-tiap tenaga yang dikeluarkan dari jabatannya karena terkena rasionalisasi, harus ditempatkan pada usaha baru yang memberikan penghidupan yang layak baginya. Demikian pula kedudukan seluruh anggota angkatan perang akan dijamin sampai dapat ditentukan status mereka. Rasionalisasi yang kita tuju ialah penyempurnaan dan pembangunan yang meringankan beban masyarakat serta mengurangi penderitaan rakyat.

Memang dalam suatu menuju perubahan tentu membawa dampak yang perlu kita cermati sebagai sesuatu yang wajar, namun disini yang dibutuhkan adalah rela berkorban dalam pribadi masing-masing karena kita tahu pada tahun-tahun

³². Harian Kedaulatan Rakyat, 24 Maret 1948.

³³. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Seruling Masa, Jilid 2A, Jakarta, 1968, hlm. 135.

pertama setelah kemerdekaan banyak sekali cobaan-cobaan yang terus menghadang, baik itu dari luar (pihak kolonial) maupun dari dalam (bangsa sendiri). Ini tentunya membutuhkan pemikiran bagi para pemimpin bangsa kita. RE-RA APRI salah satu program yang akan ditempuh Hatta, pada waktu itu memang sangat dibutuhkan sebagai bangsa yang baru saja merdeka dan juga masih adanya ancaman dari luar atau pihak Belanda yang masih ingin berkuasa lagi.

Kalau kita melihat situasi pada waktu itu, pada masa kabinet Hatta berkuasa tahun 1948 memang sangat riskan untuk suatu kabinet dalam menjalankan program-programnya, karena kita tahu pada waktu itu kabinet sering berganti-ganti. Namun Hatta tetap terus menjalankan program-programnya meskipun banyak tantangan terutama dari kelompok Amir Syarifuddin yang merasa tidak puas karena dalam kabinet Hatta kelompok Amir Syarifuddin tidak masuk dalam kabinet Hatta. Ini membuat mereka terus melakukan protes dengan berbagai macam alasan supaya salah satu program Hatta yaitu RE-RA APRI gagal. Mereka mempolitisir segala program Hatta salah satunya program RE-RA APRI dengan cara memberi statement-statement yang menghasut terutama kalangan militer yang terkena RE-RA APRI supaya memusuhi pemerintah khususnya kabinet Hatta. Ini tentunya sangat menguntungkan bagi kelompok Amir Syarifuddin apabila program ini berhasil karena mereka bakal memperoleh dukungan dari kalangan militer yang kecewa karena program RE-RA APRI.

Dibalik munculnya RE-RA APRI ada motivasi politik “golongan kiri” itu terlibat berbagai aksi poster yang menuntut ditetapkan Amir Syarifuddin sebagai

Menteri Pertahanan dalam kabinet Hatta. Tuntutan itu menunjukkan adanya ambisi-ambisi politik tertentu karena dalam sistem dan situasi negara pada waktu itu kedudukan Menteri Pertahanan sangat penting, untuk memenuhi ambisi politik jangka panjang golongan kiri.

Persoalan RE-RA APRI dalam pemerintah Hatta ini menjadi isu politik yang besar karena kesimpangsiuran di kalangan tentara, badan perjuangan maupun kelaskaran ini dikarena ketidakjelasan arah dan sasaran yang dituju RE-RA APRI. Disisi lain unsur PKI dalam BPKNIP menyangsikan rasa keadilan dalam pelaksanaan RE-RA APRI mengingat susunan kabinet yang terdiri dari orang-orang golongan menengah ke atas yang tidak akan memperhatikan rakyat. Sikap ini sebenarnya merupakan ekspresi kekecewaan sayap kiri karena tidak diikuti dalam kabinet Hatta.

Sikap Hatta untuk tidak menyerahkan kursi Menteri Pertahanan kepada unsur-unsur dari Partai Politik merupakan sikap tepat. Kalau kita melihat kembali pemerintahan sebelum Hatta, secara nyata kita bisa melihat bagaimana tentara kita dijadikan alat untuk mendukung partai ataupun pemerintahan yang ada pada waktu itu berkuasa. Kenetralan militer pada waktu itu tidak ada. Sebagai alat negara, militer banyak diintervensi oleh orang-orang tertentu yang menginginkan kekuatan militer untuk melegitimasi kekuasaannya. Belajar dari pengalaman-pengalaman itu maka Hatta berusaha untuk membentuk militer yang profesional tanpa ada intervensi baik dari golongan maupun partai, sehingga militer benar-benar netral dan hanya bertugas sebagai alat negara untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan bahwa Amir Syarifuddin telah memanfaatkan kedudukan sebagai Menteri Pertahanan untuk mempersenjawai sayap kiri untuk tujuan politik jangka panjang maka Hatta tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan dipegangnya posisi menteri pertahanan oleh PM Hatta merupakan jalan untuk mengurangi kekuatan sayap kiri.

Hal itu disebabkan karena Hatta sudah mencium gelagat yang tidak baik, kita tahu kalau golongan kiri sangat menginginkan kedudukan Mentri Pertahanan sebagai alat golongan kiri untuk memperkuat kedudukannya. Untuk itulah maka Hatta berusaha mengurangi-kekuatan Amir Syarifuddin Cs. Kalau perlu menghilangkan orang-orang Amir Syarifuddin di dalam tubuh militer. Dengan lemahnya kekuatan sayap kiri dalam militer dapat meminimalisir bangkitnya kekuatan sayap kiri yang akan menghancurkan bangsa.

2. RE – RA APRI Dalam Perspektif Ekonomi

Selain alasan-alasan politis (mengurangi pengaruh sayap kiri dalam tubuh tentara) dan munculnya RE-RA APRI juga disebabkan karena alasan-alasan ekonomi. Dalam program kabinet Hatta terlihat bahwa rasionalisasi dan pembangunan merupakan dua hal dari sekian program yang ingin dilaksanakan.

Kesulitan ekonomi dijadikan salah satu alasan munculnya kebijaksanaan RE-RA APRI, sudah muncul pada masa awal kemerdekaan yang semakin diperparah dengan adanya blokade ekonomi Belanda melalui perjanjian Linggarjati dan Renville, dimana pemerintah RI kehilangan beberapa daerah lumbung padi di daerah Jawa Barat yang terkena Garis Demarkasi Van Mook.

Dengan dikuasainya daerah-daerah penghasil padi di daerah Jawa Barat, berdampak langsung bagi ekonomi RI. Pada masa itu daerah Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang menyuplai beras khususnya di Jawa. Dengan dikuasainya lumbung –lumbung padi tersebut semakin memperparah penderitaan rakyat. Dengan langkanya beras membuat masyarakat mengkonsumsi makanan apa saja. Rendahnya kadar gizi yang terkandung dalam makanan membuat anak-anak kekurangan gizi dan terserang penyakit sehingga menyebabkan banyaknya kematian.

Kabinet Hatta sangat yakin bahwa misi RE-RA APRI dapat memainkan dua fungsi sekaligus yakni, disatu sisi dapat menghemat biaya operasional dan disatu sisi lainnya akan tersedia tenaga-tenaga produktif (bekas tentara yang terkena program RE-RA APRI. RE-RA APRI diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara , memperbesar produksi dan melakukan kebijaksanaan untuk menekan merosotnya nilai uang ORI (Oeang Republik Indonesia) sekaligus untuk mencegah beredarnya uang palsu.³⁴

Dalam pandangan Hatta, dalam tubuh angkatan perang terdapat tenaga yang tidak produktif, oleh karena itu perlu disalurkan melalui bidang-bidang produktif yang justru kekurangan tenaga tanpa menghilangkan tugas dan fungsi mereka sebelumnya sebagai tentara. Ambil contoh misalnya seorang prajurit yang terkena RE-RA APRI akan dicarikan atau ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja contohnya di pabrik, perkebunan, persawahan, atau ditempatkan di instansi-instansi pemerintah. Sebenarnya pemerintah Hatta

³⁴ . Deliar Noer, *Mohammad Hatta; Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm. 313-319.

sangat memperhatikan masa depan prajurit yang terkena RE-RA APRI dengan cara membuka lapangan-lapangan kerja baru untuk menampung para prajurit yang terkena RE-RA APRI.

Kalau konsep RE-RA APRI Hatta memperoleh hambatan, hal itu lebih disebabkan karena faktor-faktor psikologis manusiawi. Tentara maupun anggota badan perjuangan dan kelaskaran seolah-olah diperlakukan seperti “habis manis sepah dibuang”.³⁵ Para pejuang ini tidak dapat mengatasi beban psikologis jika harus meninggalkan atribut sebagai pejuang yang pada masa revolusi merupakan kebanggaan setiap pemuda dan beralih menjadi petani. Situasi psikologis inilah yang tidak diperhitungkan dalam perumusan kebijaksanaan RE-RA APRI.

RE-RA APRI yang oleh Hatta dianggap sebagai cara paling tepat untuk mengatasi krisis ekonomi pada waktu itu sekaligus meletakkan kerangka mendasar untuk pembangunan ternyata ditanggapi secara lain oleh tentara dan para pejuang sehingga menimbulkan persoalan pada saat pelaksanaannya. RE-RA APRI akhirnya tetap menjadi isu politis dan dimanfaatkan oleh sayap kiri untuk mencari pendukung melalui eksploitasi terhadap situasi psikologis yang dialami tentara dan pejuang yang menjadi korban RE-RA APRI. Mereka dihasut untuk memusuhi pemerintahan Hatta, yang telah melupakan jasa-jasa para prajurit, yang telah berkorban jiwa dan raga yang pada akhirnya harus berhenti jadi prajurit akibat terkena RE-RA APRI.

³⁵ . Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, 1948, Jilid VIII*, Bandung, Angkasa, 1977, hlm. 91.

3. RE-RA APRI Dalam Perspektif Militer

Pelaksanaan RE-RA APRI dikalangan tentara justru diterima sebagai suatu yang sudah lama ditunggu-tunggu karena sangat menunjang dari aspek teknis operasional militer. Dalam pandangan militer jumlah tentara yang terlalu banyak (tidak bermutu) dan tidak seimbang dengan persenjataan yang dimiliki justru membuat serangan-serangan ke posisi-posisi Belanda menjadi tidak efektif. Melalui RE-RA APRI diharapkan akan diperoleh jumlah pasukan yang sesuai dengan persenjataan yang ada sebagai persiapan jika Belanda melakukan Agresi Militer ke dua. Disamping itu jumlah tentara yang proporsional akan mudah membentuk menjadi tentara yang profesional atau sesuai standar militer yang ada pada waktu itu. Kita belajar pada pengalaman yang ada dimana militer adalah salah satu ujung tombak negara harus mempunyai kualitas yang memadai guna mendukung pengamanan wilayah RI dari ancaman penjajah. Untuk itulah RE-RA APRI diharapkan mampu mewujudkan cita-cita militer RI yang mempunyai kualitas dan mutu internasional.

Selain sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan adanya agresi Belanda. RE-RA APRI juga merupakan bukti “kepatuhan” tentara kepada pemerintah untuk melaksanakan salah satu pasal dari persetujuan Renville yang ditandatangani antara pemerintah RI dengan pemerintah Belanda. Pasal ini berbunyi :”bahwa sesudah penandatanganan persetujuan politik supaya dibuat aturan-aturan untuk berangsur-angsur mengurangi pasukan-pasukan bersenjata dari kedua belah pihak.”³⁶

³⁶ . Frans M. Parera, *ed. Bung Tomo : Dari 10 Nopember 1945 Ke Orde Baru*, Jakarta, PT Gramedia, 1982, hlm.142.

Dalam pandangan para pemimpin pasukan, RE-RA APRI merupakan suatu yang penting untuk mendapatkan suatu pasukan yang rasional untuk mengantisipasi “kecurangan Belanda yang diperkirakan akan memanfaatkan hijrahnya sejumlah tentara Divisi Siliwangi dari daerah-daerah diluar batas teritorial sesuai dengan apa yang disebut garis "Von Mook”

Selain RE-RA APRI untuk merasionalisasikan pasukan pada tingkat pimpinan, juga dilakukan hal yang sama pada tingkat organisasi dan pucuk pimpinan angkatan perang. Sebagai contoh : sebelum RE-RA pada prajurit ditingkat kesatuan, perlu dilakukan perombakan ditingkat atas. Hal itu perlu karena RE-RA APRI yang efektif jika dimulai dari atas.³⁷ Ini merupakan salah satu contoh yang dilakukan pemerintah Hatta dalam melaksanakan program RE-RA APRI, dimana dari pimpinan sampai prajurit rendahan akan terkena RE-RA APRI. Disini Hatta melaksanakan RE-RA APRI dari pucuk pimpinan TNI. Ini merupakan pemberian contoh bagi para prajurit dimana pimpinannya saja terkena RE-RA akan tunduk dan menjalankan, begitu juga dengan prajurit biasa.

Walaupun para pemimpin tentara telah mengeluarkan alasan-alasan RE-RA APRI dari aspek teknis militer, tetapi tetap menimbulkan kekecewaan di kalangan prajurit karena tidak ada kriteria yang jelas tentang “siapa” yang terkena dan “mengapa”. Perintah harian panglima besar hanya menuntut pimpinan.³⁸

³⁷ . Harian Api Rakyat Madiun, 17 Februari 1948.

³⁸ . Harian Kedaulatan Rakyat, 9 Maret 1948.

Ketiadaan kriteria yang jelas itulah yang menyebabkan munculnya pertanyaan “mengapa saya dan bukan dia”³⁹

Dengan demikian RE-RA APRI yang oleh pimpinan militer dianggap tetap meninggalkan “luka-luka politis” dikalangan prajurit saat dicampakkan dari seorang prajurit kemudian menjadi orang biasa. Mereka mulai belajar dari awal dalam menekuni profesi barunya yang telah lama ditinggalkan. Proses pergantian profesi ini memang sangat sulit, dulu mereka bangga menjadi seorang prajurit namun sekarang harus mereka tinggalkan. Hal itu dapat dipahami dalam konteks situasi angkatan perang pada waktu itu yang terdiri dari berbagai ideologi.

Dengan demikian maka RE-RA APRI yang oleh Hatta dimaksudkan untuk menciptakan susunan tentara, untuk mendapatkan tentara yang memiliki semangat cinta tanah air sebagai upaya Hatta untuk menyerahkan TNI sebagai bagian dari tentara serikat (*Federaal Leger*) yang merupakan tentara pemerintah sementara atau NIS (Negara Indonesia Serikat) yang dibentuk bersama Belanda.⁴⁰ Bahkan Jendral Soedirman sendiri heran dengan perhitungan teknis militer seperti yang dimaksudkan Hatta⁴¹

B. Pelaksanaan RE-RA APRI

Munculnya RE-RA APRI menimbulkan berbagai penafsiran karena adanya berbagai kepentingan politik. Dalam konteks ini maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah : apakah Hatta telah melakukan analisis situasional sehingga

³⁹ . Frans M. Parera, *op.cit.*, hlm. 148.

⁴⁰ . Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta, Gajah Mada Universiti Press, 1985, hlm. 163.

⁴¹ . Nasution, 1983. *op.cit.*, hlm. 6-8.

yakin bahwa kebijaksanaan RE-RA APRI yang ingin dilaksanakan itu dapat diwujudkan dalam kondisi politik masa itu. Apakah kebijaksanaan untuk melaksanakannya itu telah melalui suatu perhitungan politis sehingga Hatta mengantisipasi hambatan-hambatan yang akan dihadapi dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu jika benar-benar muncul.

Bagian ke tiga dari bab ini mencoba melihat pelaksanaan kebijaksanaan itu dalam situasi politik pada waktu yang merupakan lanjutan dari situasi yang tercipta sebelumnya. Dalam konteks ini apakah sasaran yang dituju RE-RA APRI Hatta tidak menimbulkan gesekan-gesekan politis dengan sayap kiri dan bagaimana Hatta menyodorkan sejumlah alternatif sebagai argumentasi kepada korban RE-RA APRI.

1. Tujuan dan Sasaran RE-RA APRI

Kabinet Hatta dihadapkan kepada tantangan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, dalam konteks ini Hatta harus mampu memenuhi keinginan baik dari angkatan perang yang terkena kebijaksanaan dan keinginan Hatta yang ingin menerapkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan RE-RA APRI mempunyai hambatan dalam melaksanakan program kerja terutama dari sayap kiri. Ketakutan sayap kiri adalah ketika rencana itu mulai diarahkan pada kesatuan bersenjata. Hal ini dapat dimaklumi sebab mosi yang diajukan sayap kiri itu hanya dimaksudkan untuk pelaksanaan RE-RA APRI pada pucuk pimpinan. Namun Hatta punya pemikiran

kalau hanya dari pucuk pimpinan saja RE-RA APRI tidak ada kemajuan yang berarti. Kalau dilihat anggota TNI pada waktu itu banyak yang tidak tahu baca tulis tentunya ini sangat mengurangi mutu militer yang bertaraf internasional yang akan dibentuk. Tentara yang banyak bukan berarti sangat membantu dalam setiap tugas atau operasi keamanan tetapi harus didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dan persenjataan yang memadai. Untuk mendapatkan tentara yang profesional (standar militer), angkatan perang perlu diciutkan personilnya, terutama dengan jalan membubarkan kesatuan-kesatuan yang tidak terlatih baik dan tidak mempunyai persenjataan yang memadai. Dalam hal ini Nasution sependapat sepenuhnya dengan Hatta yang pemerintahnya sedang menghadapi masalah besar dalam upaya memelihara dan membekali angkatan perang yang sudah membengkak. Menurut keterangan, di Jawa saja terdapat sekitar 350.000 orang anggota tentara reguler ditambah dengan 470.000 orang anggota laskar. Jumlah itu harus dikurangi sampai 160.000 orang, dengan tujuan akhir untuk membentuk sebuah tentara tetap yang terlatih baik dan bersenjata lengkap dengan jumlah personil 57.000 orang prajurit reguler.⁴²

Walaupun mendapat tantangan yang kuat terutama dari pasukan yang sudah termasuk daftar kesatuan-kesatuan yang akan dimobilisasikan, pengurangan tetap dilaksanakan. Di Sumatra keenam divisinya diciutkan menjadi tiga divisi. Ketujuh divisi tentara di Jawa dikelompokkan kembali menjadi empat divisi, yakni :

1. Divisi I, yang mempertahankan front Barat
2. Divisi II, yang mempertahankan front Utara

⁴² . Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 68.

3. Divisi III, yang mempertahankan front Timur; dan kesatuan Reserve Umum yang terdiri dari Divisi Siliwangi yang ditugaskan untuk mempertahankan frony tertentu.⁴³

Untuk mengkoordinasikan semua pasukan menjadi satu aparat pertahanan yang terpadu, dibentuklah komando-komando regional, di Jawa dibawah Nasution, dan di Sumatra dibawah Hidayat. Dalam waktu bersamaan pada tingkat bawahan dibentuk tiga belas komando subteritorial, itu dimaksudkan untuk mempersiapkan daerah mereka masing-masing dalam menghadapi kemungkinan serangan baru dari Belanda.

Namun demikian, semua rencana reorganisasi itu paling banter hanya dapat dilaksanakan sebagian saja, sampai tingkat tertentu. Penciutan jumlah personil angkatan perang telah dapat dicapai, akan tetapi reorganisasi pasukan menjadi kesatuan-kesatuan mobil dan kesatuan teritorial tak sempat mencapai tahap yang lebih lanjut karena tak lama kemudian Belanda kembali melancarkan serangan, dan juga ada tantangan yang kuat baik dari kalangan angkatan perang sendiri maupun dari partai-parti kiri.⁴⁴

Pada waktu itu jumlah anggota APRI adalah 350.000 orang. Sampai bulan juni 1948 sejumlah 60.000 anggota tentara yang telah dirasionalisasikan dan 40.000 orang lagi akan menyusul. Perdana Menteri Hatta mengakui bahwa masalah yang terbesar adalah dalam pelaksanaan program ini adalah rintangan psikologis, karena kembali ke desa menjadi petani untuk menanam singkong dan lain-lain dianggap sebagai pekerjaan romusha. Kemudian pada kenyataannya banyak

⁴³ . *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁴ . *Ibid.*, hlm. 69.

diantara mereka yang terkena rasionalisasi terkatung-katung nasibnya, karena jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan tidak mencukupi, dan juga karena banyak diantara mereka tidak cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan sehingga banyak yang memilih jadi pengangguran.

Ketakutan sayap kiri semakin menjadi-jadi jika pelaksanaan RE-RA APRI lancar maka kekuatan sayap kiri di TNI dan badan perjuangan pendukung sayap kiri akan hilang. Padahal pelaksanaan RE-RA APRI sasaran pertama adalah pimpinan dengan menghilangkan beberapa jabatan untuk menempatkan angkatan perang dibawah satu komando. Kalaupun akhirnya RE-RA APRI diarahkan pada tentara, badan perjuangan dan kelaskaran hal itu semata-mata untuk tercapainya tujuan RE-RA APRI secara keseluruhan, agar tercipta tentara yang efisien dan berkualitas.

Jika pelaksanaan RE-RA APRI menimbulkan korban itu merupakan konsekuensi logis dari niat bersama untuk mempertahankan kemerdekaan karena perjuangan pada waktu itu identik dengan memanggul senjata. Perubahan-perubahan dalam RE-RA APRI adalah :

- a. Penataan atas struktur organisasi, juga terjadi perampingan struktur organisasi pada tingkat kesatuan. Contohnya : ditubuh polisi dari 5 kesatuan menjadi satu kesatuan yaitu PM di Jawa dan CPM di luar Jawa.
- b. Penataan terhadap tanda pangkat pada waktu itu terjadi inflasi Jendral kepangkatan. Pada waktu itu tidak sesuai dengan struktur kepangkatan dalam angkatan perang modern.

Sasaran ini menyebabkan kekecewaan psikologis karena adanya penurunan pangkat satu tingkat terutama pimpinan angkatan perang yang dipromosikan dari perjuangan atau kelaskaran, dikalangan tentara kekecewaan itu tidak terlalu tampak, karena mereka dengan sukarela menerima intitusi tersebut.⁴⁵

2. Hambatan yang muncul dalam RE-RA APRI

Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa hambatan pelaksanaan RE-RA APRI ini muncul ketika sasaran RE-RA APRI ini mulai diarahkan kepada kepentingan dan eksistensi daban perjuangan dan kelaskaran. Hambatan ini dapat dimasukkan dalam dua kelompok yaitu :

- a. Hambatan yang telah diantisipasi sebelum dan telah dipersiapkan langkah-langkah antisipasinya.
- b. Hambatan yang tidak diperkirakan kemunculannya sehingga tidak dapat segera diatasi karena belum/ tidak ada langkah antisipasi.

Hambatan yang telah diantisipasi kemunculannya oleh Perdana Menteri Hatta antara lain :

- Hambatan yang datang dari sayap kiri, hal ini telah diketahuinya ketika dia menolak memberikan 10 kursi dalam kabinetnya kepada sayap kiri FDR.⁴⁶
- Reaksi dari kalangan badan perjuangan dan kelaskaran dapat dilihat dari berbagai kegiatan rapat raksasa untuk menunjukkan reaksi atas kebijaksanaan RE-RA APRI, seperti yang dilakukan oleh :Pesindo, BPRI dan Badan Perjuangan

⁴⁵ . Harian Kedaulatan Rakyat, 5 Juli 1948.

⁴⁶ . Deliar Noer, *Mohammad Hatta; Biografi Politik Jakarta*, LP3S, Jakarta, 1990, hlm. 8-9.

Situasi psikologis para pejuang itulah yang dimanfaatkan oleh FDR untuk menunjukkan sikap oposisinya sekaligus memperlambat pelaksanaan RE-RA APRI yang lambat laun akan mencapai kekuatan bersenjata dalam tubuh sayap kiri. Upaya untuk memperlambat jalannya RE-RA APRI itu ditempuh lewat berbagai cara pengalihan perhatian pemerintah lewat berbagai kegiatan pemogokan maupun perusakan untuk menunjukkan sikap tidak setuju dengan dilaksanakannya kebijaksanaan itu.⁴⁷

Kenyataannya bahwa bentrokan antara pasukan Siliwangi dan laskar-laskar serta pasukan reguler yang berhaluan kiri yang terjadi di kota Solo sama sekali bukan suatu kebetulan. Sebuah rencana yang telah disusun oleh FDR dalam bulan Juli 1948 kabarnya menetapkan agar Solo dijadikan semacam *WILD WEST* untuk meninjau kembali rencana rasionalisasi, sementara pasukan-pasukan yang berada di bawah pengaruh FDR akan mengusahakan agar kota itu tetap berada dibawah kekuasaan *de facto* golongan kiri. Rencana itu juga menetapkan bahwa kota Madiun akan dipersiapkan sebagai basis untuk perang gerilya.

Selain hambatan yang telah diantisipasi, hambatan yang muncul secara tiba-tiba dan tidak diperkirakan Hatta sebelumnya adalah keatangan tokoh komunis Muso yang mengaku membawa rencana "Gottwald" (Gottwald pemimpin partai komunis Cekoslowakia, baru saja menggulingkan pemerintahan yang sah di Praha).⁴⁸ Dia dengan segera diterima menjadi pemimpin PKI. Dalam tempo beberapa hari sesudah itu Amir Syarifuddin dan pemimpin partai Buruh mengaku secara terus terang bahwa sebenarnya mereka sudah menjadi komunis sejak

⁴⁷ . Pinardi, *op.cit.*, hlm. 30.

⁴⁸ . Ulf Sundhaussen, *op.cit.*, hlm. 70

bertahun-tahun dan menerima baik usul Muso untuk melebur partai-partai mereka ke dalam PKI.

Dalam serangan-serangan terhadap pemerintah, PKI menyerang program RE-RA APRI sebagai suatu cara untuk menarik dukungan dari prajurit-prajurit yang telah dibebastugaskan serta kesatuan-kesatuan yang akan dibubarkan. Khususnya rencana Nasution, mengenai pembentukan pasukan tempur mobil dan pasukan pertahanan teritorial dikecam sebagai upaya untuk memilah-milah angkatan perang menjadi sebuah “tentara kelas satu” dan apa yang oleh golongan kiri dinamakan “tentara kelas kambing”. Menurut para pengecam/PKI “tentara kelas kambing” tersebut terdiri dari laskar-laskar dan kesatuan reguler yang tidak disenangi oleh perwira-perwira bekas KNIL. Pada akhirnya seluruh rencana rasionalisasi itu dicap sebagai “Rencana Spoor” (Spoor adalah panglima tentara Belanda dan calon Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), yang mengandung tuduhan bahwa para perwira bekas KNIL sedang mengadakan persengkongkolan dengan Belanda dan kesatuan Nasution sendiri, Divisi Siliwangi, lalu mereka juluki sebagai “*Stoot Leger Wilhelmina*”, yang artinya Tentara Penyerang Wilhelmina (Wilhelmina ketika itu masih Ratu Negeri Belanda, 1948 diganti Ratu Juliana), sebagai sindiran terhadap kata singkatan SLW untuk Siliwangi.⁴⁹

Dalam kenyataannya, Divisi Siliwangi tampaknya memang mendapat perlakuan istimewa dari para perencana pertahanan. Nasution membubarkan tidak hanya kesatuan-kesatuan laskar, tapi juga divisi-divisi angkatan laut dan tentara

⁴⁹ . *Ibid.*, hlm. 70.

reguler, termasuk kesatuan-kesatuan yang masih bertempur di daerah pertahanan yang tadinya ditentukan bagi mereka. Sebaliknya Divisi Siliwangi yang telah mengosongkan bagian terbesar dari daerah asalnya tidak terkena rencana demobilisasi dan hanya dicituk menjadi tiga brigade untuk memperoleh perbandingan 1:1 antara personil dan senjata.⁵⁰ Keputusan ini sudah tentu menimbulkan kemarahan di kalangan kesatuan-kesatuan yang akan dibubarkan, dan PKI dengan cepat memanfaatkan persoalan itu untuk keuntungannya. Antagonisme yang dikipasi PKI antara pasukan Siliwangi di satu pihak, dan laskar-laskar yang radikal serta kesatuan-kesatuan reguler yang akan dibubarkan di pihak lain, mencapai puncaknya dalam bulan Agustus dan September 1948 ketika terjadi bentrokan senjata di daerah Solo.

Walaupun banyak hambatan dalam pelaksanaan RE-RA APRI ternyata dalam aspek sasaran dan daerah tertentu memberikan hasil yang memuaskan. Divisi Siliwangi yang terkena hijrah merupakan kelompok yang paling penting dalam menjalankan RE-RA.⁵¹

3. Alternatif Pemecahan

Perdana menteri Hatta telah menyiapkan sejumlah alternatif sebagai jalan keluar untuk menampung mereka yang terkena RE-RA APRI. Adapun program yang telah disiapkan antara lain :

- a. Mengharapkan kerelaan dari mereka untuk kembali pada profesi sebelumnya

⁵⁰ . *Ibid.*, hlm. 71.

⁵¹ . *Harian Api Rakyat Madiun*, 28 Mei 1948.

- b. Mengintegrasikan mereka melalui kementerian untuk kemudian disalurkan pada bidang-bidang kerja produktif
- c. Menempatkan 10 orang di setiap desa sebagai tenaga inti untuk tentara cadangan di desa-desa.⁵²

Ketiga alternatif itu dimaksudkan untuk membuang kesan seolah-olah “habis manis sepah dibuang”. Maka pemerintah menciptakan lapangan kerja, membuka sejumlah industri dan menyediakan lahan-lahan produksi.

Dilihat dari konsep itu terlihat Hatta menempatkan persoalan RE-RA APRI hanya dalam kerangka ekonomi dan seolah-olah Hatta mengesampingkan persoalan psikologis dari para pejuang. Hatta sebenarnya menyadari betapa sulitnya memindahkan prajurit yang sudah sekian lama bertempur ke perusahaan atau industri dalam masyarakat atau bidang usaha lain. Banyak diantara mereka yang tidak senang bekerja, seolah bekerja adalah suatu yang hina.

Apa yang dikhawatirkan Hatta memang benar-benar terbukti yaitu bahwa memindahkan pekerjaan prajurit ke bidang yang belum pernah ditekuni memang sulit dan juga karena dalam diri prajurit sudah tertanam semangat bertempur sehingga sangat mengganggu jika kembali pada profesi lama setelah sekian lama ditinggalkan demi perjuangan.

Sebenarnya kabinet Hatta dalam melaksanakan programnya memiliki beberapa hal yang menguntungkan, sehingga sulit untuk diserang. Pertama mosi RE-RA APRI datangnya dari pihak komunis sendiri pada masa kabinet Amir, mosi itu bertujuan agar lebih mudah mengawasi dan menguasai tentara (TNI).

⁵² . Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 328.



Mosi ini merupakan usaha pemusatan kekuatan militer pada tangan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Upaya ini akhirnya gagal setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Dengan demikian kelompok pemerintah dapat menangkis serangan-serangan FDR dengan menunjukkan bukti bahwa mereka hanya meneruskan kebijaksanaan sebelumnya.

Persoalan-persoalan sosial psikologis yang dilihat sayap kiri sebagai unsur yang tidak menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan RE-RA APRI inilah yang menjadi kendala mengapa alternatif pemecahan yang ditawarkan walaupun sangat baik ditinjau dari aspek pembangunan ekonomi seolah macet sebelum dilaksanakan secara konkrit. Bahkan bukan saja macet sebelum dilaksanakan tetapi lebih parah lagi adalah bahwa kondisi ini dimanfaatkan oleh sayap kiri sebagai alat untuk mengintimidasi mereka yang terkena RE-RA APRI untuk bersikap memusuhi pemerintah. Keberhasilan FDR mencari pendukung untuk mengikuti garis oposisi ini merupakan dampak langsung dari pelaksanaan RE-RA APRI. Dampak langsung dari pelaksanaan RE-RA APRI dalam hubungannya dengan peristiwa Madiun akan dibahas dalam bab berikutnya.

BAB IV

DAMPAK PELAKSANAAN RE-RA APRI

Pada bagian-bagian awal skripsi ini telah digambarkan situasi politik yang mendahului dan mewarnai proses perumusan dan pelaksanaan RE-RA APRI. Dari deskripsi itu juga telah terlihat bagaimana tokoh-tokoh politik, terutama PM Hatta, yang melakukan analisis situasional pada waktu itu sampai pada pengambilan keputusan untuk meneruskan program RE-RA APRI PM Amir Syarifuddin yang belum terlaksana karena jatuhnya kabinet Amir.

RE-RA APRI yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa telah terjadi pemusatan kekuatan bersenjata selama periode revolusi, yaitu setelah kemerdekaan. Upaya untuk mempertahankan eksistensi kekuatan-kekuatan bersenjata itu bertolak dari asumsi yang berkembang pada waktu itu yang mengatakan bahwa revolusi itu belum berakhir. Upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu semakin memberi keyakinan kepada kekuatan-kekuatan bersenjata bahwa revolusi belum berakhir, dan oleh karenanya kurang beralasan jika pemerintah ingin segera mungkin melaksanakan RE-RA APRI yang ditengarai sebagai kebijakan untuk menghilangkan eksistensi kekuatan-kekuatan bersenjata yang ada.

Walaupun pemerintah telah berupaya untuk menjelaskan bahwa RE-RA APRI dimaksudkan untuk dan masih dalam konteks mempertahankan revolusi, tetapi penjelasan itu tidak memberikan hasil yang optimal. Hal itu lebih

disebabkan karena pemerintah dianggap tidak konsisten dalam berpikir dan tidak konsekwen dalam tindakan untuk mempertahankan revolusi setelah terbukti bahwa pemerintah lebih condong kepada strategi perjuangan melalui diplomasi. Akan tetapi ketika kebijaksanaan itu menyebabkan lemahnya RI terhadap Belanda seperti ditandatanganinya persetujuan Linggar Jati maupun Renville, serta terjadinya aksi militer Belanda I yang menyebabkan terlampauinya batas teloransi yang telah ditetapkan kekuatan-kekuatan bersenjata.

Penolakan sejumlah tentara dan badan perjuangan terhadap pelaksanaan RE-RA APRI menunjukkan adanya perbedaan persepsi dalam pemilihan strategi perjuangan. Tetapi ada juga anggota tentara, badan perjuangan yang tidak menolak pelaksanaan RE-RA APRI. Ini merupakan bukti adanya perbedaan karakteristik latar belakang munculnya ideologi dan tujuan politik dari unsur-unsur yang ada dalam tentara, badan perjuangan dan kelaskaran. Perbedaan-perbedaan ini yang menjadi penyebab mengapa kebijaksanaan RE-RA APRI memperoleh tanggapan yang berbeda-beda.

Selain faktor politisasi terhadap unsur-unsur angkatan perang faktor penghambat juga muncul dari interpretasi yang berbeda terhadap maksud dan tujuan dilaksanakannya RE-RA APRI. Hambatan yang muncul bersumber dari adanya dugaan bahwa kebijaksanaan itu dimaksudkan untuk menghilangkan eksistensi badan-badan perjuangan dan kelaskaran. Sementara anggota tentara resmi menduga bahwa RE-RA APRI dimaksudkan untuk mengurangi jumlah tentara yang terlalu banyak (tidak bermutu/masih adanya anggota TNI yang buta huruf) dan tidak terkoordinasi secara baik sehingga RI selalu mengalami

kekalahan dalam setiap pertempuran. RE-RA APRI dimaksudkan untuk memperoleh susunan pasukan yang efektif dan efisien serta terkoordinasi dengan baik untuk menghadapi tentara pendudukan yang memiliki susunan pasukan yang lebih terampil dan didukung dengan persenjataan yang mutakhir, harus ditempuh dengan RE-RA APRI.

Pemerintah yang tetap pada pendirian untuk melaksanakan kebijaksanaannya harus berhadapan langsung dengan korban-korban RE-RA APRI yang merasa diperlakukan seolah “habis manis sepah dibuang”. Kekecewaan psikologis tentara itu kemudian dimanfaatkan oleh golongan sayap kiri untuk membentuk koalisi baru yang menentang pemerintah dan kebijaksanaan RE-RA APRI. Koalisi baru antara pihak FDR/PKI dengan korban-korban RE-RA APRI itu berupaya untuk terciptanya suatu konspirasi (persekongkolan) untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu FDR berusaha untuk mencari dukungan dari tentara, ulama, partai politik dan rakyat pada umumnya.

Penjelasan awal skripsi ini juga telah menunjukkan bahwa munculnya berbagai hambatan dan juga dampak dari pelaksanaan RE-RA APRI karena Hatta tidak melakukan analisis situasional, sehingga perangkat antisipasi yang dipersiapkan untuk mengatasi hambatan dan dampak yang ditimbulkan tidak berfungsi optimal tetapi juga karena munculnya variabel lain yang belum atau tidak diduga sebelumnya oleh Hatta. Perubahan politik Amir Syarifuddin, munculnya figur Muso dan terbentuknya FDR merupakan salah satu penentu munculnya hambatan dan dampak dari pelaksanaan RE-RA APRI terlepas dari sudah atau belum adanya langkah antisipasi.

Setelah Hatta menjadi PM berbagai cara ditempuh untuk menekan kabinet Hatta. Langkah pertama dilakukan adalah meminta Hatta untuk menyediakan 10 kursi menteri untuk FDR. Penolakan Hatta dijadikan alasan untuk beroposisi.

Sikap oposan FDR semakin menjadi-jadi setelah Hatta menolak tawaran hubungan kansuler dengan Uni Soviet berkat diplomasi Suripno (salah seorang tokoh sayap kiri yang diutus Hatta untuk mencari dukungan di negara-negara Eropa Timur sesaat setelah kemerdekaan).⁵³

Selain upaya menekan Hatta melalui cara-cara konstitusional itu FDR juga menempuh cara inkonstitusional dengan mengadakan demonstrasi, pengrusakan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya cara-cara seperti inilah yang mulai menunjukkan bahwa warna PKI sangat dominan dalam FDR.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah FDR sudah merasa kuat untuk beroposisi terhadap pemerintah, dan apakah para tokohnya telah mengetahui bahwa RE-RA APRI akan diarahkan Hatta terutama kepada kekuatan sayap kiri pendukung FDR, dan apakah strategi untuk memperlambat jalannya pelaksanaan RE-RA APRI baik melalui cara parlementer maupun non parlementer merupakan langkah yang tepat.

Terlepas dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang jelas usaha FDR terus mencari dukungan, selain usaha utama untuk memperlambat jalannya pelaksanaan RE-RA APRI terus dilakukan dengan berbagai cara. Selain mencari dukungan dikalangan angkatan perang dukungan untuk FDR juga dicari dari rakyat. Untuk memperoleh dukungan masyarakat FDR melakukan propaganda

⁵³ . Pinardi, *op,cit.*, hlm.32.

dengan memanfaatkan situasi yang ada dimana ekonomi sedang hancur disebabkan ketidakisannya pemerintah dalam memimpin negara. Disamping menyebarkan isu kepada masyarakat (terutama masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah) FDR/PKI tidak segan-segan untuk mengintimidasi masyarakat dengan aksi fisik maupun teror.

Sedangkan untuk memperoleh dukungan dari angkatan perang FDR memanfaatkan “kekecewaan psikologis” sejumlah pimpinan kesatuan yang terkena penurunan pangkat atau tergeser kedudukannya. Selain itu FDR juga berusaha mencari dukungan dari tokoh-tokoh agama dengan cara memasuki pesantren-pesantren (dengan cara mendekati para kyai).

Kedatangan Muso sebagai seorang tokoh PKI pada tanggal 3 Agustus 1948 melalui Bukit Tinggi dan tiba di Yogyakarta tanggal 11 Agustus memberikan suasana yang menyenangkan bagi FDR yang sedang menjalankan politik oposisinya terhadap kabinet Hatta. Pengaruh Muso yang demikian besar itu terlihat dengan diangkatnya Muso sebagai ketua FDR.

Walaupun Muso telah menunjukkan kepiawaiannya dalam merumuskan taktik dan strategi perjuangan, tetapi pengaruh Muso dalam perangkat pendukung operasi ternyata kurang berarti. Dalam hal ini tersingkirnya posisi orang no 1 Amir Syarifuddin oleh Muso ternyata memberikan kerugian ditinjau dari pendukung operasional. Hal ini dapat dimaklumi karena unsur-unsur sayap kiri dalam angkatan perang lebih dekat dengan Amir Syarifuddin ketimbang Muso yang kurang dikenal dikalangan angkatan perang. Setelah mengetahui

tersingkirnya Amir oleh Muso dikalangan angkatan perang mulai mengurangi dukungannya kepada FDR/PKI.

Dari fakta ini terlihat bahwa Muso tidak memiliki kemampuan melakukan analisis situasi yang tepat sebagai akibatnya maka keputusan untuk melakukan pemberontakan tidak diperhitungkan situasi riil yang dihadapi yaitu menyangkut kekuatan pendukung pemberontak.

Dengan demikian terlihat bahwa faktor kedatangan Muso membawa keuntungan sekaligus kerugian bagi sayap kiri. Keuntungannya itu dirasakan oleh kelompok yang ingin cepat memperjuangkan tujuan yang telah dirumuskan FDR. Sedangkan bagi kelompok terbesar yaitu kelompok dibawah pengaruh Amir Syarifuddin kedatangan Muso membawa kerugian karena mementahkan strategi jangka panjang yang telah disusun. Tergesernya Amir Syarifuddin sebagai orang pertama dalam tubuh militer disini terlihat bahwa Muso tidak menggunakan variabel ikatan emosional yang telah dipersiapkan Amir Syarifuddin dengan menyusupkan orang-orangnya kedalam tubuh militer, yang berakibat menurunnya pengaruh sayap kiri dalam tubuh militer.

Kebijakan Hatta dalam RE-RA APRI telah menimbulkan dampak yang luas karena kebijaksanaan itu berhubungan dengan faktor-faktor psikologis tentara. Faktor-faktor psikologis inilah yang diclaim oleh kekuatan politik yang berkepentingan sebagai sesuatu yang dikesampingkan Hatta dalam pelaksanaan RE-RA APRI. Pertanyaan yang sering muncul dalam pelaksanaan RE-RA APRI adalah : *mengapa saya, dan bukan dia, mengapa kelompok saya, sedangkan kelompok itu tidak.*

Bertolak dari kenyataan itu maka pisau RE-RA APRI pertama kali diarahkan Hatta kepada Divisi Siliwangi dan badan perjuangan BPRI (barisan pemberontak Republik Indonesia) yang hampir mencapai target. Ini membuat Hatta semakin optimis bahwa keberhasilan yang sama juga akan diraih dalam kesatuan angkatan perang maupun badan perjuangan dan kelaskaran lainnya.

Padahal jika dilihat secara mendalam berdasarkan prakondisi keberhasilan RE-RA APRI itu dimungkinkan dua hal:

1. Kondisi Divisi Siliwangi sudah padu sejak dibawah komando Nasution dan juga karena RE-RA APRI sudah pernah dilaksanakan Nasution pada tahun 1947 tanpa menimbulkan gejolak.
2. Karena dalam posisi hijrah dan tidak memiliki daerah kekuasaan, maka RE-RA APRI bukan merupakan masalah jika diberlakukan bagi kesatuan ini.

Sedangkan keberhasilan RE-RA APRI dalam tubuh BPRI selain Bung Tomo sebagai pimpinan BPRI Bong Tomo juga ditunjuk sebagai ketua pelaksana RE-RA APRI dalam tubuh badan perjuangan dan kelaskaran. Keberhasilan ini disebabkan karena padunya organisasi ini karena telah teruji sebelumnya seperti pada pertempuran 10 November 1945.

Persoalan menjadi panas setelah Hatta berencana membubarkan TNI Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana besar sayap kiri. Kejadian ini menimbulkan dugaan sayap kiri bahwa sasaran pisau RE-RA APRI berikutnya adalah Divisi IV (Panembahan Senopati) yang merupakan pendukung utama sayap kiri. Maka dimulailah proses propaganda untuk mencari dukungan

sekaligus mempertahankan eksistensi sayap kiri setidaknya tidaknya memperlambat jalannya RE-RA APRI.

Untuk mencapai itu FDR/PKI menempuh 2 strategi sekaligus yang pertama dengan melakukan berbagai aksi makar dan kekacauan di daerah solo untuk mengalihkan perhatian pemerintah dari RE-RA APRI yang sudah dilaksanakan dengan begitu pemerintah harus berkostentrasi untuk memadamkan kekacauan. Yang kedua penciptaan suasana kacau di Solo juga dimaksudkan untuk memancing Divisi Siliwangi untuk masuk ke daerah Solo, maka diharapkan konsentrasi Divisi Siliwangi akan terpecah sehingga tidak dapat mencapai Madiun, yang merupakan pusat kekuatan FDR/PKI. Insiden tanggal 15 september 1948 yang melibatkan Divisi Siliwangi melawan Divisi Panembahan Senopati merupakan puncak dari kekacauan yang diciptakan FDR/PKI.

Keruhnya suasana di Jawa Tengah, khususnya Surakarta, pada dasarnya tidak lepas dari rencana FDR/PKI untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan *wild west*. Hal ini terungkap setelah presiden Sukarno secara khusus memerintahkan penggebrekan ke rumah Amir Syarifuddin. Dirumah Amir Sjarifudin ditemukan dokumen-dokumen yang memuat rencana FDR/PKI, tertanggal 5 Februari 1948. Isi dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabinet Presidensial harus dibubarkan dan diganti secepatnya dengan kabinet parlementer. Kabinet parlementer harus dibentuk oleh FDR/PKI.
2. Kabinet yang bukan kabinet ahli melainkan kabinet Masyumi yang ditutupi kabinet Hatta. Dengan dalih apa pun FDR/PKI tidak dapat menerima

kabinet Masyumi itu sebab pemerintah berbau agama. Padahal prinsip sosialisme dan komonisme bertentangan dengan agama.

3. Kabinet Hatta pastilah tidak dapat melaksanakan keempat programnya.
4. FDR tidak mengizinkan Amir Syarifuddin menjadi ketua delegasi dan dia harus mundur. Amir Syarifuddin harus kembali ke dalam kabinet, setidaknya menjadi menteri pertahanan. Dari kedudukan itu FDR/PKI akan mempertahankan posisi-posisi kunci dan dapat membiayai partai-partai disayap kiri.
5. Kita harus menjelaskan :
 - a. Siapakah sebenarnya yang memecah- belah rakyat.
 - b. Mengapa FDR tidak dapat ikut serta dalam Kabinet Hatta.
 - c. Mengapa kabinet Amir Syarifuddin bubar.
 - d. Dalam persatuan nasional, kita tetap berusaha untuk mewujudkannya dengan syarat-syarat yang menguntungkan persatuan tadi, juga sejarah dan idiologi kita.
 - e. Syarat mutlak untuk mempertahankan kemerdekaan nasional adalah aksi-aksi buruh, tani, dan pemuda.
6. Cara melaksanakan kampanye untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tingkat pertama disesuaikan dengan situasi.
 - a. Aksi-aksi dikota (buruh dan pemuda) harus sesuai dengan aksi-aksi di desa-desa.

- b. Dalam keadaan sekarang dan pertimbangan butir 6 ayat a, waktunya belum tiba untuk melancarkan pemogokan dan boikot bila waktunya tiba maka instruksi akan diumumkan.
 - c. Aksi-aksi sekarang diarahkan kepada propaganda dengan cara-cara pertemuan umum, pertemuan tertutup, pertemuan bersama dengan partai lain, serta pertemuan dengan pejabat pemerintah, polisi, tentara, kampanye pers, pamflet, poster, radio, dan cara-cara propaganda lain.
 - d. Penerimaan anggota baru secara besar-besaran terutama setelah pertemuan-pertemuan.
 - e. Dalam propaganda, agama jangan dihina. Sebaliknya haruslah ditekankan kepada pemeluk agama tadi bahwa mereka harus menjaga kesucian agama mereka. Hal ini berarti bahwa mereka FDR menyetujui ajaran agama dengan ... "*delicate teaching*". Tetapi bagaimanapun juga tujuan sosial-ekonomis adalah tujuan ideal kita. Jika kekuasaan telah ada ditangan kita, semuanya akan beres.
7. Semua pertemuan dalam butir 6 ayat d haruslah diselenggarakan dalam hubungan dengan FDR dan bukan untuk kepentingan partai yang lain.
 8. Kelompok-kelompok yang memecah persatuan aksi buruh, petani pemuda harus diserang dalam berbagai segi, pemerintahan, parlemen, organisasi massa, sarakat buruh, BTI, dan lain-lainnya.
 9. Menurut pasal 28 UUD 1945 anggota tentara tidak dilarang untuk ikut demonstrasi sebagai warga negara.

10. Kita harus waspada terhadap kaum radikal kiri supaya mereka tidak mengambil keuntungan dengan membuka kedok dan usaha-usaha kita.
11. Disamping hal-hal yang telah dinyatakan dalam butir enam diatas, aksi-aksi ilegal dan positif harus diambil.
 - a. Selama kabinet Masyumi masih memerintah, aksi aksi akan menimbulkan kekacauan dimana-mana dengan cara mengarahkan gerombolan-gerombolan kriminal untuk merusak dan merampok siang dan malam. Jika hal ini dapat berjalan efisien dan tepat, seluruh rakyat akan hidup dalam ketakutan dan sebagai akibatnya pemerintah akan kehilangan kepercayaan dari rakyat.
 - b. Tindakan tindakan keras harus dijalankan seperti menculik, kalau perlu terhadap mereka yang menentang rencana FDR, Partai Buruh Merdeka, Serekat Buruh Gula, dan lainnya.

Diantara dokumen-dokumen yang disita itu ada yang menyatakan susunan angkatan bersenjata dan menyebut-nyebut kota Madiun sebagai basis perang gerilya untuk perjuangan jangka panjang.⁵⁴

Mempertimbangkan kenyataan semacam itu, maka tindakan maka tindakan presiden Soekarno dalam mengantisipasi kemelut ditubuh tentara dengan memerintahkan Mayor Jendral A.H. Nasution untuk menyusun rencana penumpasan pemberontakan FDR/PKI di Madiun adalah langkah yang tepat. Sebab, beberapa jam setelah naskah yang disusun Mayor Jendral Nasution itu ditandatangani oleh presiden Soekarno, FDR/PKI sudah melakukan

⁵⁴ . Tim Penyusun Jawa Pos, *Lubang-Lubang Pembantaian*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm.14.

pemberontakan di Madiun dan kota-kota lainnya. Dan pada hari Sabtu, 18 September 1948 merupakan awal perjuangan bersenjata kaum komonis untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh pemberontakan FDR/PKI, ada baiknya kita mengetahui tentang daerah Madiun. Luas daerah Madiun meliputi 6506 kilometer persegi. Di daerah Madiun terdapat beberapa kompleks pegunungan yang merupakan kondisi medan yang ideal untuk dijadikan sebagai daerah basis gerilya untuk mempersiapkan perlawanan jangka panjang. Hutan-hutan di Jawa Timur ketika itu masih cukup lebat, sedangkan hutan jati yang terbentang antara Sala-Madiun cukup luas. Kenyataan nantinya daerah-daerah hutan ini dipergunakan sebagai daerah konsolidasi pasukan-pasukan FDR/PKI setelah Madiun diduduki TNI.

Dari segi sosial ekonomi, daerah Sala-Madiun terdapat pabrik-pabrik gula antara lain Tasikmadu, Sragen, dan lain-lain. Sedangkan di Madiun terdapat fasilitas-fasilitas logistik berupa gudang-gudang makanan, bank-bank, dan sarana-sarana perhubungan baik pelabuhan maupun lapangan terbang. Dari segi militer di kota Madiun terdapat konsentrasi besar pasukan-pasukan FDR/PKI, oleh rakyat dinamakan sebagai tentara merah. Pasukan-pasukan ini berasal dari brigade 29 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Dahlan. Pasukan ini sebenarnya bertugas untuk menghadapi agresi militer Belanda. Disamping kesatuan-kesatuan Brigade 29, masih ada kesatuan-kesatuan bekas Biro Perjuangan dan TNI Masyarakat dibawah pimpinan Djoko Sujono⁵⁵. Penempatan kekuatan paling tidak 5 (lima)

⁵⁵. *Ibid.*, hlm. 141.

Batalyon di daerah Madiun merupakan modal utama untuk mendukung rencana-rencana politik FDR/PKI selanjutnya, untuk mendirikan pemerintahan komunis.

Setelah terjadi konflik di Solo antara tentara Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati membuat pemerintah menyatakan Solo dalam keadaan perang dan mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur Militer yang bertujuan untuk mendamaikan kedua pasukan dan menghentikan tembakan-menembak. Tetapi segala insruksi dari Gubernur Militer itu tidak digubris oleh tentara Divisi IV. Sejarah mencatat, bahwa PKI gagal menjadikan “*Wild West*” kota Solo, karena pemerintah segera menindaknya. Meskipun sudah dilumpuhkan di Solo, namun PKI tidak mau menyerah kalah mereka akan melanjutkan “*revolusinya*” di Madiun.

Madiun memang sudah lama dipersiapkan menjadi basis kekuatan PKI. Apalagi Brigade 29 sebelumnya telah bercokol, hingga dengan mudahnya pasukan merah menguasai kota. Kekalahan FDR/PKI di Solo merupakan suatu setback bagi PKI. Di setiap arena pertempuran pasukan-pasukan PKI kehilangan kredibilitasnya, dipukul mundur dan dikejar oleh pasukan-pasukan TNI. Kemenangan-kemenangan pasukan pemerintah di Solo cepat atau lambat akan dilanjutkan dengan gerakan-gerakan militer ofensif terhadap kekuatan PKI di Madiun. Ini membuat para pimpinan PKI dihadapkan pada dua kemungkinan yang kedua-duanya tidak menguntungkan:

1. Melancarkan ofensif balas terhadap pemerintah dengan demikian dapat menguasai suatu daerah “yang dibebaskan” untuk memperluas pengaruh PKI

2. Menantikan waktu yang baik sampai Muso selesai melakukan kunjungan-kunjungannya ke seluruh daerah RI dan usaha-usaha lain untuk mematangkan situasi dan kondisi bagi pelancaran revolusi komunis.⁵⁶

Pada tanggal 18 September 1948 FDR/PKI telah meninggalkan perjuangan “parlementernya”, beralih keperebutan kekuasaan (melakukan kudeta). Pasukan-pasukan bersenjata PKI dengan cepat menduduki gedung-gedung pemerintah, Markas Komando Pertahanan Jawa Timur, Kantor-kantor Polisi, Bank-Bank, Kantor Pos dan lain-lain. Lebih lanjut Soemarsono selaku Gubernur Militer daerah Madiun atas nama Pemerintah Rakyat di Madiun, menyatakan bahwa PKI tidak terikat lagi pada Republik Indonesia. Pada jam 10.00 pagi RRI Madiun yang sudah berada ditangan komunis menyiarkan:

“Sekarang sudah tiba saatnya mengobarkan revolusi. Republik berusaha menyerahkan Bangsa dan tanah Indonesia kepada Belanda. Republik dan Belanda bekerja sama untuk menindas bangsa Indonesia. Kolaborator fasis Hatta memperlak Republik untuk menjajah kaum buruh dan tani. Pemerintah Republik seluruhnya terdiri dari pengkhianat-pengkhianat Madiun sudah bangkit. Revolusi sudah dikobarkan. Kaum buruh sudah melucuti polisi dan tentara Republik. Pemerintahan Buruh dan Tani sudah dibentuk. Mulai saat ini senjata kita tidak boleh berhenti memuntahkan peluru sampai kemerdekaan, keamanan dan ketentraman pulih di negeri Indonesia tercinta ini”⁵⁷

Perebutan kekuasaan secara serentak dilakukan di kota-kota dan di daerah-daerah lain di karesidenan Madiun, di Ponorogo, Magetan, Pacitan, Gorong-gareng dan lain-lain. Bendera Merah dikibarkan di daerah-daerah ini yang telah “dibebaskan”. Perebutan kekuasaan dilanjutkan dengan penangkapan-penangkapan aparatur pemerintahan, anggota-anggota Tentara, Polisi, Pimpinan

⁵⁶ . Himawan Soetanto, *Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, PT. Penebar Swadaya, 1994, hlm. 144.

⁵⁷ . *Ibid.*, hlm. 145.

pimpinan Partai Masyumi, dan lain-lain yang bertentangan dengan FDR/PKI, untuk kemudian dibantai dengan kejam di luar batas peri kemanusiaan secara masal.

Sejak perebutan kekuasaan terhadap kekuasaannya terhadap Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948, FDR/PKI telah berhasil menguasai kota-kota Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Purwantoro, Wonogiri, Sukuharjo, Ngawi, Cepu serta kota-kota lain. Kemudian dengan aksi-aksi diluar batas kemanusiaan, FDR/PKI melakukan pembantaian untuk mengganti aparatur Republik dengan manusia-manusia FDR/PKI. Kenyataan itu saja mengancam keselamatan RI yang sudah terjepit oleh hasil perjanjian Renville. Oleh karena itu Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas untuk menumpas aksi pengkhianatan FDR/PKI yang telah menusuk revolusi dari dalam.

Pada tanggal 19 September 1948, pada jam 20.00 malam Presiden Soekarno mengucapkan pidatonya melalui RRI Yogyakarta, yang merupakan pembukaan tabir secara nasional sehingga polarisasi jelas, antara lain dinyatakan dengan tegas:

“Rakyat yang kucinta. Atas nama perjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru kepadamu.” Pada saat yang begitu genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya di dalam menentukan nasib kita sendiri, dan kita adalah memilih antara dua: Ikut Muso dengan PKI-nya, yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia Merdeka atau ikut Soekarno-Hatta, yang Insya Allah dengan bantuan Tuhan, akan memimpin negara RI Merdeka, tidak dijajah oleh negara manapun juga. Madiun harus lekas di tangan kita kembali”⁵⁸

⁵⁸. Ibid., hlm.48

Didalam beberapa hari saja, setelah amanat Presiden RI tersebut di atas, membanjirlah pernyataan-pernyataan yang datang dari seluruh pelosok tanah air yang menyatakan:”**memilih dan berdiri sepenuhnya di belakang Soekarno-Hatta.**”

Sementara itu di Madiun terjadi suatu perubahan di dalam pimpinan kemiliteran PKI. Kolonel Djoko Sujono ditetapkan menjadi Gubernur Militer mengganti Soemarsono, pimpinan berganti dari seorang perwira yang berasal dari “Laskar Perjuangan”, kepada seorang perwira “profesional”. Pasukan-pasukan FDR/PKI mulai terdesak di dalam posisi defensif, perbandingan kekuatan dengan pasukan-pasukan penyerang TNI, adalah lima dibanding sebelas.

Berita tentang adanya perebutan kekuasaan PKI di Madiun diterima pada sore hari tanggal 18 september 1948 di Ibu Kota Yogyakarta. Pemimpin-pemimpin TNI yang syah, seperti Kepala Staf Pertahanan Jawa Timur, perwira-perwira Staf, Komandan Sub-Teritorium, Komandan CPM dan lain-lain ditangkapi atau dibunuh. Menghadapi situasi yang demikian Panglima Besar Jendral Sudirman menghadap Presiden didampingi oleh Mentri Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Presiden memerintahkan untuk menyusun suatu konsep tindakan terhadap PKI. Adapun konsep itu berintikan: “Perintah untuk bertindak kepada APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia), menyelamatkan pemerintah menindak pemberontak dan menangkap tokoh-tokohnya, membubarkan organisasi-organisasi pendukung atau simpatisan-simpatisannya”.⁵⁹

⁵⁹ . *Ibid.*, hlm. 164.

Di bawah kekuasaan PKI, kota Madiun sunyi-senyap. Jam malam diberlakukan, lampu jalanan dimatikan sejak senja hari. Pasar dan alun-alun kota dijaga oleh tentara yang berseragam hitam. Oleh karena merasa telah menguasai keadaan, PKI mengira sudah tidak ada perlawanan terhadap mereka. Perkiraan ini ternyata meleset. Perlawanan justru datang dari para pemuda pelajar yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Di Madiun terdapat 2 kompi TRIP, yaitu satu kompi SMA dibawah pimpinan Sukanto Sajidiman dan Sabar Kumbino, serta satu kompi SMP di bawah pimpinan Soewarso. Harapan PKI, pasukan ini berpihak kepada mereka. Oleh karena itu TRIP tidak dilucuti sejak awal.⁶⁰ Harapan PKI ternyata keliru TRIP ternyata masih setia kepada pemerintah RI.

Akhirnya dengan bantuan sepenuhnya dari rakyat yang menjadi penunjuk-penunjuk jalan, memberikan informasi-informasi tentang medan, cuaca, musuh di lapangan, dan lain-lain operasi-operasi militer TNI di daerah Madiun dapat diselesaikan dalam waktu 46 hari. Sejak diawalnya operasi ini oleh Brigade II Siliwangi sampai tanggal 9 November 1948, ketika sisa pasukan pemberontak dimana di dalam masih terdapat pemimpin-pemimpinnya, seperti Amir Sjarifuddin, dan lain-lain. Muso, pemimpin pemberontak PKI utama, tertembak mati oleh salah satu patroli pasukan Brawijaya, di selatan Ponorogo pada tanggal 31 Oktober 1948. Rencana PKI untuk menjadikan daerah Madiun sebagai basis gerilya yang terkuat untuk dapat melakukan perlawanan yang panjang ternyata tidak berhasil mereka wujudkan.

⁶⁰ . Pusat Sejarah Dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, Jilid I, Jakarta, Yayasan Telapak, 1995, hlm. 120.

Melihat kenyataan, gagalnya pemberontakan PKI Madiun disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa kita simpulkan:

1. Persiapan PKI sangat gegabah, sebab, melihat penangkapan-penangkapan tokoh-tokoh komunis di Yogyakarta dengan mudahnya itu membuktikan bahwa persiapan PKI kurang teliti.
2. PKI salah memperhitungkan kekuatan lawan adalah kecerobohan PKI-Muso, hingga dengan gampang pasukan pemerintah memulihkan suasana kembali.
3. Dan yang paling penting adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Diluar kota Madiun, dimana dukungan rakyat amat diharapkan FDR/PKI dapat berlangsung baik, pada kenyataanya sangat rendah.⁶¹

Pemberontakan PKI telah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, kurang dari tiga bulan. Pasukannya dapat dihancurkan. Pimpinan-pimpinan pentingnya dapat ditewaskan, atau ditawan. Dalam hal ini Republik mengalami banyak kerugian akibat pemberontakan ini, tetapi ia telah membuktikan bahwa Republik bukan komunis seperti yang seringkali dipropagandakan oleh Belanda di luar negeri. Republik dapat menyelesaikan suatu pemberontakan komunis dengan tuntas tanpa bantuan asing. Kerugian yang terbesar yang dialami Republik adalah besarnya jumlah peluru dan mesiu yang dihabiskan, yang sebenarnya sangat diperlukan untuk menghadapi agresi militer Belanda yang telah berada di ambang pintu, mengancam Republik Indonesia. Disamping kerugian

⁶¹ . Kursus Kader Katolik, *Dari Madiun Ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya Ke...?*, Jakarta, 1967, hlm. 21.

harta dan nyawa para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa raga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian gambaran pelaksanaan RE-RA APRI dan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya pada Bab V akan dibahas tentang kesimpulan dan saran, yang dimaksudkan untuk menjawab atau menyimpulkan dari permasalahan yang ada.



BAB IV
SIMPULAN

Tahun 1945 merupakan tahun-tahun pertama RI menjadi bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang baru lahir banyak sekali permasalahan baik itu politik, ekonomi, sosial dan hankam (menghadapi kembalinya Belanda untuk menguasai kembali RI) untuk itu maka perlunya tentara sebagai alat negara untuk menjaga kedaulatan bangsa ini ditandai dengan berdirinya BKR kemudian TKR dan TNI, disamping badan perjuangan dan kelaskaran. Disisi lain kita juga harus menghadapi propaganda Belanda dengan mematuhi beberapa persetujuan antara lain persetujuan Linggarjati dan Renville yang membuat RI semakin lemah karena harus mematuhi dari perjanjian itu yang lebih banyak merugikan RI.

Kedaaan politik yang tidak menentu pada masa pemerintahan Perdana Menteri Hatta mendorong untuk melakukan suatu perubahan yang mendasar. Empat program yang diajukan Hatta dianggap mampu mengatasi permasalahan atau setidaknya dapat mengurangi beban yang dihadapi pemerintah pada masa itu. Namun dari sekian program kabinet Hatta, salah satunya adalah program RE-RA APRI banyak mendapat kritikan terutama dari golongan kiri disamping badan perjuangan dan kelaskaran, mereka berpikir pada situasi revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan malah diadakan pengurangan anggota tentara. Namun menurut Hatta RE-RA APRI merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada karena pada masa itu jumlah tentara terlalu

banyak dan tidak didukung dengan SDM yang memadai (masih banyak mereka yang buta huruf)

Program RE-RA APRI yang oleh Hatta telah disiapkan alternatif pemecahan dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan ternyata masih belum bisa mengatasi keadaan yang ada terutama dampak psikologis para tentara yang terkena RE-RA APRI. Keadaan demikian dimanfaatkan PKI untuk menggalang kekuatan untuk memusuhi pemerintah. Terjadinya beberapa konflik bersenjata antara Divisi Siliwangi dan Divisi Penembahan Senopati telah membuktikan betapa meruncingnya konflik yang ada. Puncaknya setekah PKI menguasai Madiun sebagai basis pertahanan dan menyatakan memisahkan diri dari RI. Dalam menghadapi situasi yang demikian pemerintah bertindak tegas dengan segera presiden Soekarno memerintahkan perebutan Madiun dengan segera, kurang dari tiga bulan Madiun dapat direbut.

Dari pemaparan secara ringkas terhadap isi skripsi ini terlihat bahwa persoalan RE-RA APRI merupakan unsur terpenting atau juga dapat dikatakan sebagai pemicu utama dari peristiwa Madiun. Korelasi antara RE-RA dengan peristiwa itu tidak dapat dilacak secara langsung, tetapi berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan dalam skripsi ini dapat dikatakan bahwa ada korelasi tidak langsung antara keduanya. Ketidakpastian itu disebabkan karena belum terungkapnya fakta seputar pertanyaan: Apakah FDR/PKI sudah merencanakan sebuah kudeta, dan RE-RA APRI hanya mempercepat rencana tersebut. Namun disini perlu ditegaskan bahwa tentara yang terkena RE-RA APRI bukan pemberontak PKI Madiun.

Terlepas dari kesimpulan tersebut kebijaksanaan RE-RA APRI yang menimbulkan dampak cukup besar jika dihubungkan dengan peristiwa Madiun hanya memberikan semacam perenungan:

1. Bahwa tentara tidak harus selalu dipahami dalam kerangka organisasi kemiliteran semata sehingga akan selalu tunduk kepada atasan sebagai perwujudan dari garis komando yang hirarkis tetapi harus dipahami selalu sebagai "manusia" yang juga mempunyai harapan-harapan jika diabaikan, maka akan menimbulkan kemarahan yang merupakan faktor kodrati dari setiap manusia "manusia tentara"
2. Dalam kondisi politik yang tidak stabil segala bentuk kebijaksanaan yang mengusik kepentingan politik tertentu akan selalu menimbulkan reaksi. Dalam konteks ini reaksi penolakan dari sejumlah unsur angkatan perang terhadap kebijaksanaan RE-RA APRI, walaupun reaksi itu kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, hal itu lebih disebabkan karena kelemahan pemerintah dalam menganalisis situasi psikologis tentara.
3. Perlu ada penegasan tentang apakah anggota tentara boleh terlibat dalam proses politik, ataukah hanya sebagai alat negara untuk mendukung dan lebih akomodatif terhadap pemerintah. Berbagai persoalan politik yang muncul dalam angka perang bermula dari ketidaktegasan fungsi itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, AH, *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2A, Kenangan Masa Gerilya*
Jakarta; Gunung Agung, 1983.
- , *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia : Diplomasi Sambil Bertempur, Jilid III*, Bandung, Angkasa, 1977.
- , *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia : Pemberontakan Madiun, Jilid VIII*, Bandung, Angkasa, 1977.
- , *Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta, Seruling Masa, 1968.
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Tulisan*, Jakarta, PT. Gramedia, 1982.
- Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1990.
- Frans M. Parera, ed. *Bung Tomo : Dari 10 November 1945 ke Orde Baru*, Jakarta, PT. Gramedia, 1982.
- Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT. Gramedia, 1992.
- Moedjanto, G, *Indonesia Abad ke 20*, Yogyakarta, Kanisius, 1988.
- Himawan Soetanto, *Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, UNS Press, 1955.
- Nugroho Notosusanto (Editor), *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985.

Himawan Soetanto, *Rebut Kembali Madiun*, Jakarta, UNS Press, 1955.

Nugroho Notosusanto (Editor), *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985.

Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1985.

Iwa Kusuma Sumantri, *Sejarah Revolusi Indonesia, jilid II*.

Kursus Kader Khatolik, *Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya ke ...*, Jakarta, 1967.

Kuntowijoyo, *Metedologi Sejarah*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1994.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (terjemahan)*, Nugroho Notosusanto, Jakarta, Universitas Indonesia, 1975.

Pinardi, *Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*, Jakarta, Inkopak-Hazera, 1966.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, jilid I*, Jakarta, Yayasan Telapak, 1995.

Mani, P.R.S., *Jejak Revolusi 1945*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-967*, Jakarta, LP3ES, 1986.

Tim Penyusun Jawa Pos, *Lubang-lubang Pembantaian*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1990.

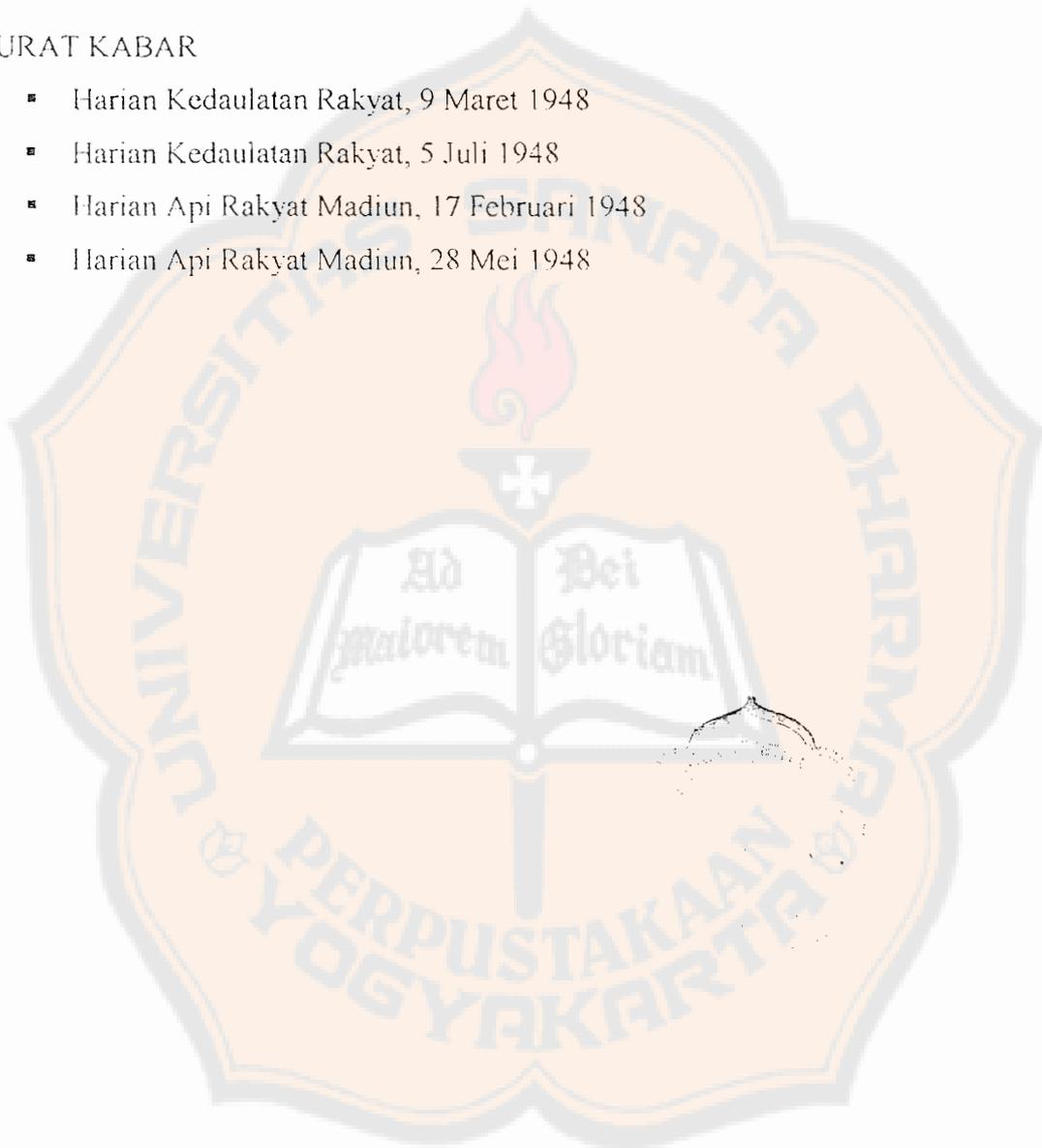
Tjokropranolo, *Jendral Sudirman*, Jakarta, PT. Suryo Presindo, 1992.



Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982.

SURAT KABAR

- Harian Kedaulatan Rakyat, 9 Maret 1948
- Harian Kedaulatan Rakyat, 5 Juli 1948
- Harian Api Rakyat Madiun, 17 Februari 1948
- Harian Api Rakyat Madiun, 28 Mei 1948



Melihat kenyataan, gagalnya pemberontakan PKI Madiun disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa kita simpulkan:

1. Persiapan PKI sangat gegabah, sebab, melihat penangkapan-penangkapan tokoh-tokoh komunis di Yogyakarta dengan mudahnya itu membuktikan bahwa persiapan PKI kurang teliti.
2. PKI salah memperhitungkan kekuatan lawan adalah kecerobohan PKI-Muso, hingga dengan gampang pasukan pemerintah memulihkan suasana kembali.
3. Dan yang paling penting adalah kurangnya dukungan dari masyarakat. Diluar kota Madiun, dimana dukungan rakyat amat diharapkan FDR/PKI dapat berlangsung baik, pada kenyataanya sangat rendah.⁶¹

Pemberontakan PKI telah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, kurang dari tiga bulan. Pasukannya dapat dihancurkan. Pimpinan-pimpinan pentingnya dapat ditewaskan, atau ditawan. Dalam hal ini Republik mengalami banyak kerugian akibat pemberontakan ini, tetapi ia telah membuktikan bahwa Republik bukan komunis seperti yang seringkali dipropagandakan oleh Belanda di luar negeri. Republik dapat menyelesaikan suatu pemberontakan komunis dengan tuntas tanpa bantuan asing. Kerugian yang terbesar yang dialami Republik adalah besarnya jumlah peluru dan mesiu yang dihabiskan, yang sebenarnya sangat diperlukan untuk menghadapi agresi militer Belanda yang telah berada di ambang pintu, mengancam Republik Indonesia. Disamping kerugian

⁶¹ . Kursus Kader Katolik, *Dari Madiun Ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya Ke...?*, Jakarta, 1967, hlm. 21.